

**LAPORAN DATA UTAMA PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, VIETNAM,
PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN
SINGAPURA**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
2024**

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	4
A.1. LATAR BELAKANG	4
A.2. PROSEDUR	4
A.3. TINGKAT KERJA SAMA..	7
B. PENYELIDIKAN	7
B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS	7
B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI.....	9
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri	9
B.2.2. Proses Produksi	9
B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang diselidiki	10
B.3. TINGKAT KERJA SAMA	11
B.4. MARGIN DUMPING	12
B.4.1. Nilai Normal	12
B.4.2. Harga Ekspor	13
B.4.3. Perhitungan Margin Dumping	13
B.5. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	23
B.6. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	26
B.6.1. Dampak Volume	26
B.6.2. Dampak Harga	27
C. FAKTOR LAIN	29
D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	30

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki.....	7
Tabel 2. Spesifikasi Pengecualian Random Copolymer	9
Tabel 3. Spesifikasi Pengecualian Terpolymer	9
Tabel 4. Spesifikasi Pengecualian Elastomer	9
Tabel 5. Produksi PP <i>Copolymer</i> Dalam Negeri.....	9
Tabel 6. Pangsa Pasar PP <i>Copolymer</i> Terhadap Konsumsi Nasional	11
Tabel 7. Indikator Kinerja IDN	23
Tabel 7.1. Penjualan, Harga domestik, HPP, dan Laba/Rugi (Operasional).	24
Tabel 7.2. Penjualan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar.....	24
Tabel 7.3. Produksi, Penjualan, Persediaan, Kapasitas Produksi dan Utilisasi Kapasitas.....	25
Tabel 7.4. Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi.....	25
Tabel 7.5. ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, Arus Kas, dan Pertumbuhan	26
Tabel 8. Volume Impor Produk PP <i>Copolymer</i>	26
Tabel 9. Pangsa Pasar PP <i>Copolymer</i> terhadap Konsumsi Nasional (%).....	27
Tabel 10. Harga Jual PP <i>Copolymer</i> dan <i>Price Undercutting</i>	28
Tabel 11. Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan	28
Tabel 12. Volume Impor Negara Lain.....	29
Tabel 13. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional	29
Tabel 14. Perkembangan Ekspor IDN.....	30

Gambar:

Gambar 1. Proses Produksi	10
---------------------------------	----

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (selanjutnya disebut KADI) melakukan penyelidikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (PT CAP), yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri yang memproduksi *Polypropylene Copolymer* (selanjutnya disebut *PP Copolymer*).
2. Sesuai dengan ketentuan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, KADI menerbitkan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan yang akan menjadi dasar keputusan akhir KADI terhadap penyelidikan anti dumping atas impor *PP Copolymer* dalam pos tarif 3902.30.90 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022, yang berasal dari Republik Korea (Korea), Vietnam, Persatuan Emirat Arab (PEA), Malaysia, dan Singapura.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan *Article 5.5. ADA*, pada tanggal 4 Juli 2023 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh yaitu Korea, Vietnam, PEA, Malaysia, Singapura di Indonesia, tentang diterimanya permohonan penyelidikan anti dumping atas produk *PP Copolymer* yang diimpor atau berasal dari Korea, Vietnam, PEA, Malaysia, Singapura.
4. KADI menetapkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
5. Perusahaan eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Korea
 - i. Hanwha
 - ii. Lotte Chemical
 - iii. S-Oil
 - b. Vietnam yang diketahui dalam permohonan adalah Hyosung
 - c. PEA yang diketahui dalam permohonan adalah Bourouge
 - d. Malaysia yang diketahui dalam permohonan adalah Lotte Chemical Titan
 - e. Singapura yang diketahui dalam permohonan adalah The Polyolefin Company (TPC)
6. Importir yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Inabata Indonesia
 - b. Itochu
 - c. Nishino Kinryo Indonesia
 - d. Nagase impor ekspor
 - e. Mitra Mulia Makmur

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

7. Pada tanggal 14 Agustus 2023, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping atas impor *PP Copolymer* yang berasal dari Korea, Vietnam, PEA, Malaysia dan Singapura di Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner Industri Dalam Negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.
8. Periode Penyelidikan (PP) untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022, sedangkan Periode Penyelidikan untuk dumping menggunakan data 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
9. Atas permintaan Pihak Yang Berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner dari tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 dan kemudian 20 Oktober 2023.
10. Pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan:
 - a. Eksportir dan/atau eksportir produsen:
 - 1) Korea:
 - a) Lotte Chemical Corporation
 - b) HD Hyundai Chemical Co., Ltd
 - c) S-OIL Corporation
 - (1) Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC") (Trader dari S-OIL Corporation yang berkedudukan di Saudi Arabia)
 - (2) SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL") (Trader dari SABIC yang berkedudukan di Singapura)
 - d) Ulsan PP Co. Ltd.
 - (1) Basell Asia Pacific Limited (Trader dari Ulsan PP Co. Ltd. yang berkedudukan di Hongkong)
 - (2) Daelim Co. Ltd (Trader Ulsan PP Co. Ltd.)
 - e) Polymirae Company Ltd.
 - f) Hanwha Total Energies Petrochemical Co., Ltd.
 - 2) Vietnam:
 - a) Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
 - 3) PEA:
 - a) Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge) – Sole Proprietorship LLC
 - (1) Borouge Pte. Ltd (Trader dari Borouge yang berkedudukan di Singapura)
 - 4) Malaysia:
 - a) Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.
 - (1) Lotte Chemical Titan Corporation Sdn. Bhd. (Trader dari Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.)

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

- 5) Singapura:
 - a) The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd
 - b) ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
- b. Importir
 - 1) PT Inabata Indonesia
 - 2) PT Itochu Indonesia
 - 3) PT Nishino Kinryo Indonesia
 - 4) PT Nagase Impor-Ekspor Indonesia
 - 5) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
 - 6) PT Sumitomo Indonesia
11. Pada tanggal 7 Februari 2024, kuasa hukum dari produsen Korea, pada tanggal 18 April 2024, kuasa hukum dari ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd., dan pada tanggal 14 Agustus 2024, kuasa hukum dari The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd menyampaikan tanggapan tertulis mengenai permintaan pengecualian untuk tipe produk PP *Copolymer* tertentu yang diklaim bukan merupakan barang sejenis dengan produksi dalam negeri dalam hal kualitas maupun penggunaan akhir.
12. Pada tanggal 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 13 September 2024 KADI melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Perindustrian untuk meminta data dan informasi terkait barang yang diselidiki.
13. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letters*) pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.
14. Dalam melakukan penyelidikan, KADI melakukan pemeriksaan ke lokasi:
 - a. Industri Dalam Negeri:
 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk : 24-26 Januari 2024
 - b. Eksportir dan/atau eksportir produsen di Singapura
 - i. The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd : 27-29 Mei 2024
 - ii. ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.: 30 Mei – 1 Juni 2024
 - iii. Saudi Basic Industries Corporation (“SABIC”) dan SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. (“SAPPL”) : 2-3 Juni 2024
 - c. Eksportir dan/atau eksportir produsen di PEA: Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge) – Sole Proprietorship LLC: 10-12 Juni 2024
 - d. Eksportir dan/atau eksportir produsen di Korea
 - i. S-Oil Corporation: 24-26 Juni 2024
 - ii. HD Hyundai Chemical Co., Ltd dan Lotte Chemicals Corporation: 27 Juni – 1 Juli 2024
15. Pada saat verifikasi ke Industri Dalam Negeri diketahui terdapat perubahan nama Pemohon yang sebelumnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk sesuai dengan akta nomor xxx tanggal

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

xxx perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama.

16. Sehubungan dengan banyaknya tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan, sesuai dengan Pasal 9 PP 34 Tahun 2011, KADI memperpanjang jangka waktu penyelidikan menjadi paling lama 18 (delapan belas) bulan.

A.3. TINGKAT KERJA SAMA

17. Penentuan tingkat kerja sama ditetapkan berdasarkan perbandingan volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila tingkat kerja sama tinggi, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerja sama rendah, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.
18. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari BPS, diperoleh tingkat kerja sama dari Korea sebesar xx%, Vietnam sebesar xx%, dari PEA sebesar xx%, dari Malaysia sebesar xx% dan dari Singapura sebesar xx%.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

19. Produk PP *Copolymer* yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari Korea, Vietnam, PEA, Malaysia dan Singapura, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan, serta dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki.

Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (“**BTKI 2022**”), uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki

Pos Tarif	Uraian Barang
3902	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal
3902.30	- Kopolimer propilena:
3902.30.90	- - Lain-lain.

Sumber: BTKI 2022.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Definisi pos tarif 3902.30.90 menurut BTKI 2022 adalah:

“Kopolimer propilena dalam bentuk selain cairan dan pasta.”

- a. Nama barang : *Polypropylene Copolymer*
- b. Pos tarif : 3902.30.90 (Kopolimer propilena dalam bentuk selain cairan dan pasta)
- c. Bea masuk MFN : Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, tarif bea masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki sebesar 10%.
- d. Karakter fisik : Padatan pellet putih, tidak berbau, tidak berasa.
- e. Komposisi kimia : Propilena, etilena, dan aditif
- f. Kegunaan barang : Kegunaan Barang Yang Diselidiki antara lain sebagai bahan baku otomotif, ember cat, wadah plastik, mainan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.
- g. Bahan baku : Propilena dan Etilena
- h. Tipe/grade : Polipropilena kopolimer impak (BI5.0GA, BI5.0GN, BI9.0GA, BI32AN, BI55GN) dan Polipropilena kopolimer random (RI10HO, RI10HO, RI20HO, RI20HC02)
- i. Standard mutu : *Melt Index/Melt Flow Rate, Flexural Modulus, dan Izod Impact*
- j. Kemasan : Kantong plastik FFS 25 Kg
- k. Teknologi : Detail mengenai teknologi produksi yang digunakan oleh PT CAP untuk memproduksi PP *Copolymer* adalah UNIPOL GAS *Phase*
- l. Proses produksi : Produksi Polipropilena kopolimer impak maupun Polipropilena kopolimer random melalui proses polimerisasi dengan bahan baku propilena dan katalis tertentu. Setelah melalui proses polimerisasi, keduanya akan melalui proses pelletizing (pembuatan pellet) sehingga terbentuk resin pellet berwarna putih.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan merujuk pada definisi pos tarif 3902.30.90 adalah Kopolimer propilena dalam bentuk selain cairan dan pasta, penyelidikan ini memeriksa barang yang diproduksi oleh Pemohon yang merupakan Barang Sejenis dengan produk *PP Copolymer* impor dari Korea, Vietnam, Malaysia Singapura dan PEA, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan, serta bersaing di pasar yang sama, dengan pengecualian spesifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Spesifikasi Pengecualian *Random Copolymer*

No	Parameter	Units	<i>Random Copolymer</i>
1	<i>Chemical Content</i>	-	mengandung 2 monomer C3-C2 atau C3-C4
2	<i>Melt Flow Rate</i>	g/10min	range 3 – 8 dan 20 – 28
3	<i>Density</i>	g/cm ³	0,90 – 0,91
4	<i>Visual</i>	-	<i>visual color transparent</i>
5	<i>Melting Point</i>	degC	125 - 140

atau

Tabel 3. Spesifikasi Pengecualian *Terpolymer*

No	Parameter	Units	<i>Terpolymer</i>
1	<i>Chemical Content</i>	-	mengandung 3 co monomer C2-C3-C4
2	<i>Melt Flow Rate</i>	g/10min	range 3 – 8
3	<i>Density</i>	g/cm ³	0,9 – 0,91
4	<i>Visual</i>	-	<i>visual colour transparent</i>
5	<i>Melting Point</i>	degC	125 - 140
6	<i>Additives</i>	-	<i>Non Calcium Stearate Content</i>

atau

Tabel 4. Spesifikasi Pengecualian *Elastomer*

No	Parameter	Unit	<i>Elastomer</i>
1	<i>Density</i>	g/cm ³	< 0,89
2	<i>Melt Flow Rate</i>	g/10min	< 4,5 atau >55
3	<i>Melting Point</i>	degC	< 130

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 5. Produksi *PP Copolymer* Dalam Negeri

Industri Dalam Negeri	Persentase (%)
PT CAP	100
Total Produksi Nasional	100

Sumber: Data Internal Pemohon, diolah

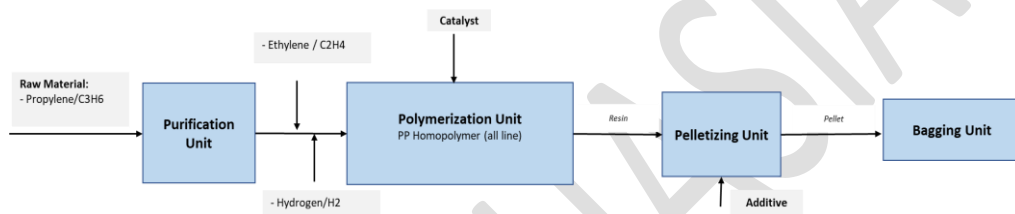
**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

21. Berdasarkan Tabel 5 di atas, terlihat bahwa PT CAP sebagai satu-satunya produsen PP *Copolymer* di Indonesia, sehingga dengan sendirinya 100% mewakili industri dalam negeri di Indonesia. Dengan demikian, Industri Dalam Negeri dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 PP 34 tahun 2011 untuk mewakili industri dalam negeri barang sejenis yang selanjutnya disebut IDN.

B.2.2. Proses Produksi

22. Proses produksi PP *Copolymer* secara umum di PT CAP sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. Proses Produksi



- Bahan baku/*raw material* berupa *Propylene* (C_3H_6) masuk ke *Purification Unit* untuk dimurnikan (dihilangkan impurities/meterial pengotornya).
- Dari purifikasi unit, *Propylene* dengan ditambahkan *ethylene* dan *Hydrogen* masuk ke dalam *Polymerization Unit* yang berupa *Reactor* sebagai tempat terjadinya reaksi polymerisasi.
- Reaksi Polymerisasi di dalam *Reactor* dapat terjadi dengan menambahkan/dibantu *catalyst*. Produk dari *Reactor* berbentuk resin.
- Resin dari *Reactor* selanjutnya akan masuk ke *Pelletizing Unit* dan ditambahkan *additive* sesuai *properties product Polypropilene* (PP) yg akan diproduksi, untuk diubah bentuknya menjadi Pellet.
- Dari *Pelletizing Unit*, PP akan masuk ke *Bagging Unit* untuk dikemas dalam karung 25 Kg dengan merk dagang "TRILENE" dan siap untuk dijual.

B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

23. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, tarif bea masuk MFN untuk PP *Copolymer* adalah sebesar 10%.
24. Tabel 6 menunjukkan pangsa pasar IDN mengalami penurunan dari 14% pada 2020 menjadi 13% pada 2021 dan stabil pada tahun 2022. Pada tahun yang sama pangsa pasar impor dumping mengalami penurunan dari 74% menjadi 71% dan kemudian meningkat menjadi 73%. Impor dari negara lainnya mengalami peningkatan dari 13% pada tahun 2020 menjadi 16% pada tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 mejadi 14%.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Selanjutnya konsumsi nasional selama tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dari 100 indeks poin menjadi 125 indeks poin.

Tabel 6. Pangsa Pasar PP *Copolymer* Terhadap Konsumsi Nasional

NEGARA	Pangsa (%)		
	2020	2021	2022
Singapura	40	38	37
Korea Selatan	24	22	25
Malaysia	5	6	5
PEA	3	2	4
Vietnam	1	3	3
Total Impor Dumping	74	71	73
Negara Lainnya	13	16	14
Total Impor	86	87	87
IDN	14	13	13
Konsumsi Nasional*	100	100	100
Konsumsi Nasional**	100	123	125

Sumber: IDN, BPS, diolah

Keterangan:

*) merupakan share pangsa pasar dengan data konsumsi nasional sebagai data acuan

***) merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data Tahun 2020 sebagai acuan data perbandingan dengan satuan indeks poin.

B.3. TINGKAT KERJA SAMA

25. Berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima oleh KADI, ditemukan bahwa tingkat kerja sama dari eksportir dan/atau produsen PP *Copolymer* yang berasal dari Korea yang menjawab kuesioner sebesar xx% bila dibandingkan dengan volume impor PP *Copolymer* yang berasal dari Korea yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, untuk perusahaan lainnya yang tidak kooperatif atau yang tidak diketahui di dalam penyelidikan (*residual duty*), besaran margin dumping ditentukan berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif.
26. Berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima oleh KADI, ditemukan bahwa tingkat kerja sama dari eksportir dan/atau produsen PP *Copolymer* yang berasal dari Singapura, Vietnam, dan PEA yang menjawab kuesioner masing-masing sebesar xx% bila dibandingkan dengan volume impor PP *Copolymer* yang berasal dari Singapura, Vietnam, dan PEA yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, untuk perusahaan lainnya yang tidak kooperatif atau yang tidak diketahui di dalam penyelidikan (*residual duty*), besaran margin dumping ditentukan berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif.
27. Berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima oleh KADI, ditemukan bahwa tingkat kerja sama dari eksportir dan/atau produsen PP *Copolymer* yang berasal dari Malaysia yang menjawab kuesioner sebesar xx% bila

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

dibandingkan dengan volume impor PP *Copolymer* yang berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, untuk perusahaan lainnya yang tidak kooperatif atau yang tidak diketahui di dalam penyelidikan (*residual duty*), besaran margin dumping ditentukan berdasarkan data terbaik yang dimiliki KADI.

B.4. MARGIN DUMPING

28. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari eksportir produsen yang kooperatif. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara harga normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan dan penyerahan yang sama.
29. KADI pada umumnya menerima pengalokasian biaya yang dilakukan oleh produsen, eksportir produsen, atau eksportir yang diselidiki dalam rangka pembebanan biaya dalam produk yang diselidiki, sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
30. Bagi produsen, eksportir, atau eksportir produsen yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama (terafiliasi) maka perusahaan tersebut akan mendapatkan margin dumping individual yang sama dengan margin dumping eksportir produsen.
31. Perhitungan margin dumping terhadap eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

B.4.1. Nilai Normal

32. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
 33. Nilai normal dihitung berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan yang diselidiki, yaitu data penjualan dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan PP *Copolymer* dalam negeri eksportir/eksportir produsen yang diselidiki dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal ditentukan pada saat penyerahan barang di pabrik (*ex-factory*).
 34. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling*)
-

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

expense), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

35. Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan apabila volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

B.4.2. Harga Ekspor

36. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
37. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

B.4.3. Perhitungan Margin Dumping

38. Analisa perhitungan margin dumping masing-masing perusahaan:

Republik Korea

a. S-Oil Corporation

S-Oil Corporation (selanjutnya disebut S-OIL) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai eksportir produsen *PP Copolymer* yang menjual produknya secara langsung ke pasar domestik di Korea dan menjual produknya ke pasar ekspor melalui trader terafiliasi yaitu Saudi Basic Industries Corporation ("SABIC") (selanjutnya disebut SABIC) dan SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL") (selanjutnya disebut SAPPL) yang salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia. Pada periode penyelidikan, S-OIL menjual sebanyak 5 tipe *PP Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 5 tipe *PP Copolymer* dengan tipe yang identik.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan *PP Copolymer* S-OIL di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik S-OIL telah memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik lebih dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan data penjualan domestik.

S-OIL hanya menjual kepada pihak tidak terafiliasi di pasar domestik. Dalam perhitungan nilai normal, KADI juga menggunakan data penjualan dengan mempertimbangkan volume penjualan yang menguntungkan. Berdasarkan perhitungan *profitability test* untuk 5 tipe produk tersebut, perhitungan nilai normal terhadap 5 tipe *PP Copolymer* yang identik dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang menguntungkan.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor S-OIL ke Indonesia dikurangi dengan *allowances* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe *PP Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk S-OIL sebesar 10,57%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor S-OIL ke Indonesia pada level CIF.

Karena S-OIL terafiliasi dengan SABIC dan SAPPL, sehingga untuk kedua perusahaan tersebut akan memperoleh margin yang sama yaitu sebesar 10,57%.

b. HD Hyundai Chemicals Co., Ltd. dan Lotte Chemicals Corporation

HD Hyundai Chemicals Co., Ltd. (selanjutnya disebut HDC) dan Lotte Chemicals Corporation (selanjutnya disebut LCC) merupakan produsen yang berafiliasi. Pada periode penyelidikan, LCC menjual sebanyak 20 tipe *PP Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 14 tipe *PP Copolymer* dengan tipe yang identik.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan *PP Copolymer* LCC di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik LCC telah memenuhi persyaratan kecukupan volume

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik lebih dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan data penjualan domestik.

LCC hanya menjual kepada pihak tidak terafiliasi di pasar domestik. Dalam perhitungan nilai normal, KADI juga menggunakan data penjualan dengan mempertimbangkan volume penjualan yang menguntungkan. Berdasarkan perhitungan *profitability test* untuk 14 tipe produk tersebut, perhitungan nilai normal terhadap 8 tipe *PP Copolymer* yang identik dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang menguntungkan. Sedangkan untuk 6 tipe produk menggunakan seluruh transaksi.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor LCC ke Indonesia dikurangi dengan *allowances* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe *PP Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk LCC dan HDC sebesar 14,81%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor LCC ke Indonesia pada level CIF.

c. PolyMirae Company Ltd. dan Ulsan PP Co., Ltd.

PolyMirae Co. Ltd (selanjutnya disebut PMC) dan Ulsan PP Co., Ltd (selanjutnya disebut UPP) merupakan produsen yang berafiliasi.

Barang yang diproduksi oleh UPP dijual di pasar domestik oleh PMC dan diekspor oleh perusahaan terafiliasi yaitu Basell Asia Pacific Limited (selanjutnya disebut) BAP yang berlokasi di Hongkong dan Daelim Co. Ltd (selanjutnya disebut DL) yang berlokasi di Korea Selatan.

Barang yang diproduksi oleh PMC dijual secara langsung oleh PMC dipasar domestik maupun ekspor.

Nilai Normal

Dalam jawaban kuesioner perusahaan menyampaikan bahwa:

- PMC tidak akan mengajukan KKB karena kami menganggap produk PP harus dianggap sebagai satu produk, mengingat berbagai macam kegunaan seperti yang disajikan di bawah ini. Meskipun kualitas dan sifat fisiknya sama, setiap produk memiliki kegunaan akhir yang berbeda, sehingga membuatnya berbeda. Oleh karena itu, PMC tidak akan memasukkan KKB dalam penghitungan margin dumping.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

- UPP tidak menggunakan KKB sebagaimana formula dalam tabel di atas. UPP tidak melakukan kategorisasi tertentu berdasarkan karakteristik produk.

Oleh karena itu, perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi. Perhitungan nilai normal berdasarkan konstruksi masih menggunakan data PMC dan UPP yaitu data biaya produksi ditambah biaya administrasi, penjualan, dan umum yang wajar, ditambah profit yang wajar.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor PMC dan UPP ke Indonesia dikurangi dengan *allowances* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe *PP Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk PMC dan UPP sebesar 82,83%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor PMC dan UPP ke Indonesia pada level CIF.

d. Hanwha Total Energies Petrochemical Co., Ltd.

Hanwha Total Energies Petrochemical Co., Ltd. (selanjutnya disebut HTEP) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai eksportir produsen *PP Copolymer* yang menjual produknya secara langsung ke pasar domestik di Korea dan menjual produknya ke pasar ekspor yang salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia. Pada periode penyelidikan, HTEP menjual sebanyak 22 tipe *PP Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 14 tipe *PP Copolymer* dengan tipe yang identik.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan *PP Copolymer* HTEP di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik HTEP telah memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik lebih dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan data penjualan domestik.

Dalam perhitungan nilai normal, KADI juga menggunakan data penjualan dengan mempertimbangkan volume penjualan yang menguntungkan.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Berdasarkan perhitungan *profitability test* untuk 14 tipe produk tersebut, perhitungan nilai normal terhadap 14 tipe *PP Copolymer* yang identik dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang menguntungkan.

Karena syarat pengiriman (*term of delivery*) yang disampaikan adalah *Delivered* dan *Ex-work*, sehingga terdapat *allowances* atau penyesuaian yang diklaim dalam transaksi *Delivered* yaitu biaya transportasi, dan biaya kredit.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor HTEP ke Indonesia dikurangi dengan *allowances* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe *PP Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk HTEP sebesar 19,58%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor HTEP ke Indonesia pada level CIF.

e. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Korea berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Korea yaitu sebesar 82,83%.

Vietnam

a. Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd (selanjutnya disebut Hyosung Vina) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai eksportir produsen *PP Copolymer* yang menjual produknya secara langsung ke pasar domestik di Vietnam dan menjual produknya ke pasar ekspor Indonesia secara langsung. Pada periode penyelidikan, Hyosung Vina hanya menjual sebanyak 15 tipe *PP Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 10 tipe *PP Copolymer*.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan *PP Copolymer* Hyosung Vina di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

transaksi penjualan domestik Hyosung Vina telah memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik lebih dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan data penjualan domestik.

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Terdapat 10 tipe *PP Copolymer* yang di ekspor ke Indonesia. Dari 10 tipe *PP Copolymer* tersebut, terdapat 9 tipe *PP Copolymer* yang identik yang dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dan terdapat 1 tipe *PP Copolymer* yang hanya dijual di pasar Indonesia tetapi tidak dijual di pasar Domestik

Dalam perhitungan nilai normal, KADI juga menggunakan data penjualan dengan mempertimbangkan volume penjualan yang menguntungkan. Berdasarkan perhitungan *profitability test* untuk 10 tipe produk tersebut, perhitungan nilai normal terhadap 8 tipe *PP Copolymer* yang identik dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang menguntungkan saja dan terhadap 1 tipe *PP Copolymer* karena penjualan domestik yang menguntungkan di bawah 20% maka dilakukan dengan metode konstruksi menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan dan Beban Operasional per unit untuk penjualan domestik ditambah dengan profit yang wajar.

Sedangkan terhadap 1 tipe *PP Copolymer* yang tidak dijual di Domestik dilakukan dengan metode konstruksi menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan per unit untuk penjualan ekspor ke Indonesia, ditambah rata-rata Beban Operasional per unit penjualan domestik, dan ditambah dengan profit yang wajar, sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor Hyosung Vina ke Indonesia dikurangi dengan *allowance* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe *PP Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk Hyosung Vina sebesar 11,40%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor Hyosung Vina ke Indonesia pada level CIF.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

b. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Vietnam berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Vietnam yaitu sebesar 11,40%.

Singapura

a. The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd (selanjutnya disebut TPC) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai produsen PP *Copolymer* yang menjual produknya ke pasar domestik di Singapura dan menjual produknya ke pasar ekspor yang salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia. Pada periode penyelidikan, TPC menjual sebanyak 23 tipe PP *Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 30 tipe PP *Copolymer*. Penjualan domestik TPC dilakukan secara langsung maupun melalui *trader* yang terafiliasi dan tidak terafiliasi dengan TPC. Kondisi yang sama terjadi pada penjualan ekspor TPC ke Indonesia dilakukan melalui *trader* yang terafiliasi dan tidak terafiliasi dengan TPC. TPC memberikan komisi kepada pihak *trader* atas penjualan terhadap PP *Copolymer* yang diproduksi oleh TPC.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan PP *Copolymer* TPC di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik TPC tidak memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik kurang dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan metode konstruksi. Konstruksi nilai normal TPC dilakukan menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan dan Beban Operasional per unit ditambah dengan profit yang wajar.

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor TPC ke Indonesia dikurangi dengan *allowance* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe PP *Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk TPC sebesar 14,60%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor TPC ke Indonesia pada level CIF.

b. ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.

ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (selanjutnya disebut EMAPPL) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai eksportir produsen PP *Copolymer* yang menjual produknya secara langsung ke pasar domestik di Singapura dan menjual produknya ke pasar ekspor yang salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia. Transaksi penjualan yang disampaikan oleh EMAPPL merupakan seluruh transaksi baik produk PP *Copolymer* dan Vistamaxx. Sehubungan dengan permohonan pengecualian untuk produk Vistamaxx, maka KADI mengeluarkan seluruh transaksi produk Vistamaxx. Pada periode penyelidikan, EMAPPL hanya menjual sebanyak 2 tipe PP *Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 8 tipe PP *Copolymer*.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan PP *Copolymer* EMAPPL di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik EMAPPL tidak memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik kurang dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan metode konstruksi. Konstruksi nilai normal EMAPPL dilakukan menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan dan Beban Operasional per unit ditambah dengan profit yang wajar

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor EMAPPL ke Indonesia dikurangi dengan *allowance* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe PP *Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk EMAPPL sebesar 13,88%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor EMAPPL ke Indonesia pada level CIF.

c. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Singapura berdasarkan margin

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Singapura yaitu sebesar 14,60%.

Malaysia

a. Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. Dan Lotte Chemical Titan Corporation Sdn. Bhd.

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. (selanjutnya disebut LCTM) merupakan perusahaan yang bertindak sebagai eksportir produsen PP *Copolymer* yang menjual produknya secara langsung ke pasar domestik di Malaysia dan menjual produknya ke pasar ekspor baik secara langsung maupun melalui trader terafiliasi yaitu Lotte Chemical Titan Corporation Sdn., Bhd (selanjutnya disebut LCTC) yang salah satu tujuan ekspornya adalah Indonesia. Pada periode penyelidikan, LCTM hanya menjual sebanyak 19 tipe PP *Copolymer* di pasar domestik dan melakukan ekspor ke Indonesia sebanyak 7 tipe PP *Copolymer*.

Nilai Normal

KADI memperhitungkan kecukupan volume penjualan domestik melalui perbandingan dari volume penjualan PP *Copolymer* LCTM di pasar domestik dan volume penjualan ekspor ke Indonesia untuk menentukan metode perhitungan nilai normal yang akan digunakan. Berdasarkan perhitungan kecukupan volume penjualan tersebut, volume transaksi penjualan domestik LCTM telah memenuhi persyaratan kecukupan volume untuk digunakan dalam penentuan nilai normal karena volume penjualan domestik lebih dari 5% sehingga nilai normal dihitung menggunakan data penjualan domestik.

Berdasarkan perbandingan harga jual LCTM kepada pihak terafiliasi (LCTC) dengan pihak tidak terafiliasi, ditemukan perbedaan harga jual yang signifikan kepada pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi. Selain itu penjualan LCTM ke LCTC sudah diketahui merupakan penjualan ekspor sehingga transaksi penjualan kepada LCTC tidak dapat digunakan dalam perhitungan.

Dalam perhitungan nilai normal, KADI juga menggunakan data penjualan dengan mempertimbangkan volume penjualan yang menguntungkan. Berdasarkan perhitungan *profitability test* untuk 7 tipe produk tersebut, perhitungan nilai normal terhadap 5 tipe PP *Copolymer* yang identik dijual di pasar domestik dan ekspor ke Indonesia dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang menguntungkan saja. Sedangkan 2 tipe PP *Copolymer* dilakukan menggunakan metode konstruksi menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan dan Beban Operasional per unit untuk penjualan domestik masing-masing tipe ditambah dengan profit yang wajar.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Harga Ekspor

Harga ekspor dihitung menggunakan data penjualan ekspor LCTM ke Indonesia dikurangi dengan *allowance* (penyesuaian) yang diklaim oleh perusahaan sehingga diperoleh harga ekspor eks-pabrik untuk masing-masing tipe PP *Copolymer* yang diekspor ke Indonesia.

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk LCTM sebesar 13,45%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor LCTM ke Indonesia pada level CIF.

Karena LCTM terafiliasi dengan LCTC, sehingga untuk kedua perusahaan ini akan memperoleh margin yang sama yaitu sebesar 13,45%.

b. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Malaysia berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Malaysia yaitu sebesar 29,01%.

PEA

a. Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge) – Sole Proprietorship LLC

Borouge merupakan produsen PP *Copolymer* dan memiliki Perusahaan afiliasi (trader) yaitu Borouge Pte. Ltd (selanjutnya disebut PTE) yang berlokasi di Singapura. Borouge menjual PP *Copolymer* ke Perusahaan afiliasinya yaitu PTE, selanjutnya PTE menjual PP *Copolymer* ke pasar domestik dan ekspor (Indonesia dan non-PEA).

Nilai Normal

KADI tidak dapat menggunakan transaksi penjualan domestik perusahaan yang telah disampaikan dalam jawaban kuesioner untuk menghitung nilai normal, karena kondisi penjualan domestik perusahaan tidak memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (semua penjualan dilakukan melalui *related trading company*). Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan *Article 2.2 ADA*, perhitungan nilai normal dilakukan dengan metode konstruksi berdasarkan harga pokok penjualan domestik ditambah biaya penjualan, umum dan administrasi serta keuntungan yang wajar.

Harga Ekspor

Harga ekspor menggunakan data penjualan Borouge dan PTE ke Indonesia dan telah dikurangi dengan *allowances* yang diklaim perusahaan dan dapat diterima. Setelah mengurangkan harga atas

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

seluruh transaksi penjualan dengan *allowances* tersebut diperoleh harga ekspor eks-pabrik

Margin Dumping

Margin dumping dihitung berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor sehingga diperoleh besaran margin dumping untuk Borouge sebesar 29,42%. Persentase besaran margin dumping dihitung dengan membandingkan nilai margin dumping dengan total nilai ekspor PTE ke Indonesia pada level CIF.

b. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya di PEA

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di PEA berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di PEA yaitu sebesar 29,42%.

B.5. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

39. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
40. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka dibawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah indikator kinerja IDN selama Periode Penyelidikan yang telah diperiksa dan diverifikasi.

Tabel 7. Indikator Kinerja IDN

Indeks

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Penjualan	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Penjualan	USD'000	100	163	147	62,5	(9,8)
Pangsa Pasar	%	100	96	93	(4,1)	(3,1)
Harga domestik	USD/MT	100	138	126	37,9	(8,8)
HPP	USD'000	100	189	155	89,0	(17,8)
HPP	USD/MT	100	143	143	43,1	-
Laba (Rugi) operasional	USD'000	100	217	(14)	117,2	(106,6)
Produksi	MT	100	132	109	32,1	(17,8)
Persediaan	MT	100	367	235	267,4	(36,0)
Kapasitas produksi	MT	100	100	100	-	-
Utilisasi Kapasitas	%	100	132	109	32,1	(17,8)
Tenaga Kerja Langsung	Orang	100	78	77	(21,5)	(1,6)
Produktivitas	MT/orang	100	168	141	68,3	(16,5)
Upah	USD	100	84	79	(16,1)	(5,7)
Pertumbuhan laba rugi	%	100	165	(168)	65,2	(201,7)

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
ROI	%	100	212	(211)	112,3	(199,5)
Kemampuan meningkatkan modal	%	100	182	(187)	82,5	(202,4)
Arus Kas	USD	100	57	(64)	(42,9)	(212,4)

Sumber: IDN, diolah.

41. Tabel 7 di atas merupakan indikator kinerja ekonomi IDN yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang akan disampaikan pada resital 42 – 47

Tabel 7.1.

Penjualan, Harga domestik, HPP, dan Laba/Rugi (Operasional)

Indeks

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Penjualan	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Penjualan	USD'000	100	163	147	62,5	(9,8)
Harga domestik	USD/MT	100	138	126	37,9	(8,8)
HPP	USD'000	100	189	155	89,0	(17,8)
HPP	USD/MT	100	143	143	43,1	0,0
Laba (Rugi) operasional	USD'000	100	217	(14)	117,2	(106,6)

Sumber: IDN, diolah.

42. Tabel 7.1 menunjukkan bahwa volume penjualan yang meningkat pada tahun 2020-2021 sebesar 17,9% dan mengalami penurunan sebesar 1,1% pada tahun 2021-2022. Kondisi ini sejalan dengan harga domestik IDN pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 37,9% dan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,8%. Selanjutnya, pada tahun 2020-2021 HPP IDN mengalami peningkatan sebesar 43,1% dan pada tahun 2021-2022 tidak mengalami perubahan. Stabilitasnya HPP dan menurunnya harga pada tahun 2021-2022 menyebabkan IDN mengalami rugi operasional.

Tabel 7.2. Penjualan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Indeks

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Penjualan	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Konsumsi Nasional	MT	100	123	125	22,9	2,1
Pangsa Pasar	%	100	96	93	(4,1)	(3,1)

Sumber: IDN, diolah.

43. Tabel 7.2 menunjukkan bahwa konsumsi nasional selama tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021-2022 disaat konsumsi

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

nasional mengingkat, penjualan dan pangsa pasar IDN justru mengalami penurunan.

**Tabel 7.3. Produksi, Penjualan, Persediaan,
Kapasitas Produksi dan Utilisasi Kapasitas**

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
					Indeks	
Produksi	MT	100	132	109	32,1	(17,8)
Penjualan	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Persediaan	MT	100	367	235	267,4	(36,0)
Kapasitas produksi	MT	100	100	100	-	-
Utilisasi Kapasitas	%	100	132	109	32,1	(17,8)

Sumber: IDN, diolah.

44. Tabel 7.3 menunjukkan produksi IDN pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 32,1% sedangkan volume penjualan meningkat sebesar 17,9% sehingga menyebabkan persediaan meningkat sebesar 267,4% pada periode yang sama. Selanjutnya, pada periode 2021-2022 produksi mengalami penurunan sebesar 17,8% sedangkan penjualan hanya mengalami penurunan sebesar 1,1%. Penurunan produksi yang lebih besar dari penurunan penjualan, menyebabkan persediaan menurun sebesar 36% pada tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa IDN telah melakukan penjualan atas persediaan.
45. Selain itu, Tabel 7.3 juga menunjukkan kapasitas mesin IDN selama 2020-2022 menunjukkan angka yang stabil dengan jumlah produksi IDN pada tahun 2020 sebesar 100 indeks poin, pada tahun 2021 sebesar 132 indeks poin, dan pada tahun 2022 sebesar 109 indeks poin, sehingga mencapai utilisasi kapasitas sebesar 100 indeks poin pada tahun 2020, 132 indeks poin pada tahun 2021, dan 109 indeks poin pada tahun 2022. Meskipun utilisasi kapasitas mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 sebesar 32,1%, namun demikian pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 17,8%. Hal ini terjadi karena pada tahun yang sama produksi mengalami penurunan sebesar 17,8%.

Tabel 7.4. Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi

Indikator	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
					Indeks	
Tenaga Kerja Langsung	Orang	100	78	77	(21,5)	(1,6)
Upah Tenaga Kerja Langsung	USD	100	84	79	(16,1)	(5,7)
Produksi	MT	100	132	109	32,1	(17,8)
Produktivitas	MT/orang	100	168	141	68,3	(16,5)

Sumber: IDN, diolah

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

46. Tabel 7.4 menunjukkan jumlah tenaga kerja langsung IDN pada tahun 2020-2021 terus mengalami penurunan dari 100 indeks poin menjadi 77 indeks poin. Dengan penurunan jumlah tenaga kerja tersebut upah tenaga kerja juga mengalami penurunan dari 100 indeks poin menjadi 79 indeks poin pada periode yang sama. Dengan penurunan jumlah tenaga kerja, IDN masih dapat meningkatkan jumlah produksi pada tahun 2020-2022 sebesar 32,1% meskipun mengalami penurunan sebesar 17,8% pada tahun 2021-2022. Sejalan dengan perkembangan produksi, produktifitas tenaga kerja menunjukkan peningkatan sebesar 68,3% pada tahun 2020-2021 dan mengalami penurunan sebesar 16,5% pada tahun 2020-2022.

**Tabel 7.5. ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal,
Arus Kas, dan Pertumbuhan**

Indikator	Unit	Indeks		
		2020	2021	2022
Pertumbuhan laba rugi	%	100	165	(168)
ROI	%	100	212	(211)
Kemampuan meningkatkan modal	%	100	182	(187)
Arus Kas	USD	100	57	(64)

Sumber: IDN, diolah

47. Tabel 7.5 untuk menganalisa indikator pertumbuhan, ROI, kemampuan meningkatkan modal dan Arus kas menggunakan data perusahaan secara keseluruhan (total perusahaan), tabel indikator menunjukkan pada periode penyelidikan 2022 perusahaan mengalami kerugian (minus) menyebabkan keempat indikator ini juga terpengaruh (minus).

B.6. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.6.1. Dampak Volume

B.6.1.1. Absolut

Tabel 8. Volume Impor Produk PP Copolymer

NEGARA	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Singapura	MT	146.100	168.650	170.232	15,4	0,9
Korea Selatan	MT	87.777	99.966	111.539	13,9	11,6
Malaysia	MT	19.397	25.093	21.657	29,4	(13,7)
PEA	MT	11.418	8.557	16.208	(25,1)	89,4
Vietnam	MT	2.482	13.902	11.821	460,0	(15,0)
Total Impor Dumping	MT	267.175	316.168	331.457	18,3	4,8
Negara Lainnya	MT	45.473	70.420	65.068	54,9	(7,6)
Total Impor	MT	312.648	386.589	396.525	23,7	2,6

Sumber: BPS, diolah.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

48. Tabel 8 menunjukkan bahwa secara absolut impor produk PP *Copolymer* dari negara lainnya pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 55% dan kemudian pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8%. Disisi lain impor dari negara yang dituduh selalu mengalami peningkatan sebesar 18% pada tahun 2020-2021 kemudian meningkat kembali sebesar 5% pada tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan impor dari negara yang dituduh dumping berkontribusi terhadap peningkatan impor PP *Copolymer* Indonesia.

B.6.1.2. Relatif

Tabel 9. Pangsa Pasar PP Copolymer terhadap Konsumsi Nasional (%)

NEGARA	Pangsa (%)		
	2020	2021	2022
Singapura	40	38	37
Korea Selatan	24	22	25
Malaysia	5	6	5
PEA	3	2	4
Vietnam	1	3	3
Total Impor Dumping	74	71	73
Negara Lainnya	13	16	14
Total Impor	86	87	87
IDN	14	13	13
Konsumsi Nasional*	100	100	100
Konsumsi Nasional**	100	123	125

Sumber: IDN, BPS, diolah

Keterangan:

*) merupakan share pangsa pasar dengan data konsumsi nasional sebagai data acuan

***) merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data Tahun 2020 sebagai acuan data perbandingan dengan satuan indeks poin.

49. Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun pangsa pasar impor dari negara yang dituduh dumping mengalami penurunan dari 74% pada tahun 2020 menjadi 71% pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada pangsa pasar IDN yang juga mengalami penurunan dari 14% pada tahun 2020 menjadi 13% pada tahun 2021. Selanjutnya pangsa pasar impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2021-2022, namun pangsa pasar IDN stabil dimana pada tahun yang sama konsumsi nasional mengalami peningkatan dari 123 indeks poin menjadi 125 indeks poin.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

B.6.2. Dampak Harga

B.6.2.1. *Price Undercutting*

Tabel 10. Harga Jual PP Copolymer dan *Price Undercutting*

No	NEGARA	Unit	Indeks		
			2020	2021	2022
1	IDN	USD/MT	100	100	100
2	Singapura	USD/MT	131	115	126
3	Korea Selatan	USD/MT	111	106	115
4	Malaysia	USD/MT	113	103	117
5	PEA	USD/MT	99	99	100
6	Vietnam	USD/MT	127	100	105
7	Total Negara Dumping	USD/MT	122	110	120
<i>Price Undercutting</i>					
8	Singapura	USD/MT	31	15	26
9	Korea Selatan	USD/MT	11	6	15
10	Malaysia	USD/MT	13	3	17
11	PEA	USD/MT	(1)	(1)	(0,2)
12	Vietnam	USD/MT	27	0,03	5
13	Total Negara Dumping	USD/MT	22	10	20

Sumber: BPS, diolah
Harga impor + MFN + THC

50. Tabel 10 menunjukkan bahwa harga impor PEA berada di bawah harga IDN pada selama 2020-2022, sedangkan harga impor Singapura, Korea, Malaysia, dan Vietnam selalu di atas harga IDN selama tahun yang sama.

B.6.2.2. *Price Suppression & Price Depression*

Tabel 11. Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan

No	NEGARA	Unit	2020	2021	2022	Indeks	
						Perubahan 2020- 2021	2021- 2022
1	Harga Jual IDN	USD/MT	100	138	126	38	(9)
2	HPP	USD/MT	89	128	128	43	-
3	Selisih	USD/MT	(11)	(10)	2		

Sumber: IDN, diolah.

Keterangan: Harga jual IDN tahun 2020 sebagai acuan data perbandingan.

51. Tabel 11 menunjukkan harga jual IDN pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 38%, peningkatan harga dipengaruhi oleh peningkatan HPP sebesar 43% pada tahun yang sama. Namun pada tahun 2021-2022 di saat HPP tidak mengalami perubahan, harga jual IDN mengalami penurunan sebesar 9%. Hal ini membuat IDN mengalami rugi.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

C. FAKTOR LAIN

Tabel 12. Volume Impor Negara Lain

Keterangan	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Impor Negara Lainnya	MT	45.473	70.420	65.068	54,9	(7,6)
Impor Negara Dumping	MT	267.175	316.168	331.457	18,3	4,8
Impor Negara Lainnya	USD/MT	1.346	1.687	1.706	25,4	1,2
Impor Negara Dumping	USD/MT	1.176	1.469	1.452	24,9	(1,17)

Sumber: BPS, diolah.

52. Tabel 12 menunjukkan bahwa volume impor dari negara lain selama 2020-2021 naik sebesar 54,9% dan sempat mengalami penurunan pada 2021-2022 sebesar 7,6%, walaupun selama periode penyelidikan 2020-2021 impor dari negara lain mengalami kenaikan sebesar 43,1% namun jika volume impor negara lainnya dibandingkan dengan impor negara dumping terlihat bahwa jumlah impor dumping masih jauh lebih besar. Harga rata-rata impor dumping masih dibawah harga impor dari negara lain, sehingga impor dari negara lain bukan penyebab kerugian IDN.

Tabel 13. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Indeks

Keterangan	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2020-2021	2021-2022
Singapura	MT	100	115	117	15,4	0,9
Korea Selatan	MT	100	114	127	13,9	11,6
Malaysia	MT	100	129	112	29,4	(13,7)
PEA	MT	100	75	142	(25,1)	89,4
Vietnam	MT	100	560	476	460,0	(15,0)
Total Impor Dumping	MT	100	118	124	18,3	4,8
Negara Lainnya	MT	100	155	143	54,9	(7,6)
Total Impor	MT	214	265	271	23,7	2,6
Penjualan IDN	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Konsumsi Nasional	MT	100	123	125	22,9	2,1

Sumber: IDN, BPS, diolah.

53. Tabel 13 menunjukkan bahwa selama periode penyelidikan konsumsi nasional terus mengalami peningkatan dari 100 indeks poin pada tahun 2020 menjadi 125 indeks poin pada tahun 2022. Peningkatan konsumsi nasional yang terus menerus tidak memberikan kontribusi terhadap kerugian IDN.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Tabel 14. Perkembangan Ekspor IDN

Indeks

Keterangan	Unit	2020	2021	2022	Perubahan	
					2021-2020	2022-2021
Ekspor	MT	100	1	2	(99.1)	145.1
Domestik	MT	100	118	117	17,9	(1,1)
Total penjualan	MT	100	104	103	4	(0,9)

Sumber: IDN, diolah.

54. Tabel 14 menunjukkan bahwa penjualan ekspor IDN sangat kecil hanya sekitar xx% - xx% dan pasar domestik merupakan pasar utama IDN, sehingga penjualan ekspor tidak berpengaruh pada kerugian yang dialami IDN.

55. Teknologi

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa, teknologi yang digunakan dalam industri produsen PP *Copolymer* secara umum relatif sama. Hasil pemeriksaan di lapangan membuktikan bahwa IDN menggunakan teknologi UNIPOL GAS *Phase* yang relatif sama dengan produsen yang dituduh dumping. Oleh sebab itu, faktor teknologi bukan penyebab kerugian IDN.

D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

D.1. Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI)

56. Terdapat 1 negara lagi yang memiliki volume impor di atas 3 (tiga) persen, yaitu Thailand dengan volume sebesar 13%. Perlu dikaji kembali apakah pemohon tidak menuduh Thailand sebagai negara yang diduga dumping dikarenakan terdapat impor dari Thailand? Karena apabila terdapat impor dari Thailand, maka permohonan penyelidikan pengenaan Tindakan antidumping ini tidak dapat dilanjutkan

Jawab:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti awal dalam Permohonan maupun jawaban kuesioner yang sudah di verifikasi, IDN tidak melakukan impor atas Barang Dumping.

57. Berdasarkan data *public annual report* PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) tahun 2022 dapat dilihat bahwa CAP dimiliki saham sebesar 30,57% oleh Siam Cement Group yang juga mempunyai industri petrokimia di Thailand serta total eksportnya tahun 2022 mencapai USD 438 Juta atau sekitar 30% dari penjualan dalam negeri. Hal ini berarti ada hubungan afiliasi antara CAP dengan Siam Cement Group.

Jawab:

Sesuai dengan definisi Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011, bahwa Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk: a. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; **dan** b. importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.

Sehingga, tanggapan bahwa adanya afiliasi, tidak serta merta membatalkan hak CAP untuk menjadi IDN dalam hal Tindakan Antidumping karena Perusahaan tersebut tidak melakukan impor atas Barang Dumping.

58. CAP belum dapat memenuhi beberapa grade produk tertuduh, sehingga harus ada pengecualian atas grade tersebut dalam 1 HS code

Jawab:

KADI telah melakukan pemeriksaan atas jawaban kuesioner IDN maupun eksportir produsen yang telah diverifikasi, dan terbukti bahwa ada beberapa grade tertentu yang tidak diproduksi IDN sehingga akan mempertimbangkan adanya pengecualian.

59. Kopolimer yang digunakan pada produk BOPP dan CPP yang sangat sensitive terhadap kualitas untuk mendapatkan property sealing tertentu dan penggantian grade tidak akan mudah karena SIT (seal initiation temperature) nya sangat spesifik tidak hanya untuk produsen tapi juga bagi pelanggan yang menggunakannya. Polimer yang tidak cair (gel) perlu di control karena Sebagian besar film tipis 12-35 micron digunakan sebagai kemasan special. COF (coefficient of friction), kelengketan, dan transparansi merupakan property penting dari film BOPP dan CPP. Terlebih lagi hal ini berkaitan dengan kemasan makanan di mana kontaminasi dan sertifikasinya dalam proses kualifikasi sangat penting.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58 di atas, KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini.

60. Harga yang tidak kompetitif: beban bea tambahan akan menarik impor murah dari China, Asia Tenggara dan negara negara pengekspor lainnya

Jawab:

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap produsen dalam negeri yang merasa dirugikan dengan adanya barang impor yang terbukti dumping dapat mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping. Bea Masuk Anti Dumping tidak dimaksudkan untuk menghalangi masuknya barang impor, karena hanya impor dumping yang terdampak atas pengenaan BMAD. Sedangkan impor dari negara lain maupun eksportir produsen yang tidak melakukan dumping tidak akan dikenakan BMAD. Pengenaan BMAD dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi persaingan yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian akibat *unfair trade*, sehingga

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

menciptakan kondisi persaingan perdagangan yang sama (*same level playing field*).

61. Rekualifikasi oleh pembeli:

Perubahan grade akan menyebabkan proses rekualifikasi yang Panjang dan terlebih lagi pada pasar ekspor yang dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar anggota ABOFI terhadap produsen dari negara lain karena jarak dan waktu yang lebih panjang.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58, KADI akan mempertimbangkan pengecualian dalam penyelidikan ini, supaya pengenaan BMAD dapat tepat sasaran kepada barang yang sejenis dengan produksi dalam negeri yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.

62. Material kopolimer BOPP, random kopolimer dan terpolymer yang digunakan anggota ABOFI tidak diproduksi oleh produsen local dan Sebagian besar diimpor. Konsumsi bahan yang sedang dalam proses investigasi tersebut dalam BOPP film sangat kecil. Terdapat faktor lain yang disebutkan di atas yang dapat menjadi pertimbangan untuk memasukkan kopolimer/random terpolymer yang digunakan dalam film BOPP dengan kode HS 3902.30.90 ke dalam daftar pengecualian investigasi

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58 di atas, bahwa KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini sepanjang Pihak Yang Berkepentingan menyampaikan bukti dukung yang dapat diverifikasi kebenarannya.

63. Berdasarkan investigasi yang dilakukan KADI, resin ini juga akan dikenakan anti dumping dan produk akhir yang terbuat dari resin ini akan menjadi tidak kompetitif. Pengecualian investigasi kopolimer, random, dan terpolymer akan membantu kami bersaing dengan impor murah dari Tiongkok, Asia Tenggara, dan negara pengekspor lainnya.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58 di atas, bahwa KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini

64. Pada bagian B angka 1, nilai normal, Pemohon menyampaikan bahwa perhitungan harga domestic untuk Vietnam dan PEA menggunakan informasi dari jurnal internasional/ data dan zzzx bersifat tidak rahasia (non confidential), sehingga seharusnya pemohon dapat menampilkan angka tersebut pada table halaman, tidak di XXX

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Penyajian data yang disampaikan dalam Permohonan sepenuhnya disampaikan oleh Pemohon, dan telah disampaikan dalam versi rahasia kepada KADI.

65. Untuk perhitungan harga domestic Korea, Malaysia dan Singapura, Pemohon melakukan metode konstruksi. Dapat dilihat disini bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang tidak objektif antara negara-negara yang dituduh dumping. Pemohon melakukan metode konstruksi untuk Korea, Malaysia, dan Singapura karena impor ketiga negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan Vietnam dan PEA. Seharusnya pemohon juga bisa mendapatkan informasi dari jurnal internasional untuk ketiga negara tersebut.

Dalam melakukan metode konstruksi untuk perhitungan normal value, Pemohon menggunakan konstruksi struktur biaya Pemohon, sedangkan untuk biaya/harga bahan baku naphta, menggunakan harga masing masing negara. Disini dapat dilihat bahwa pernyataan dalam permohonan saling bertentangan.

Jawab:

Sesuai dengan ADA bahwa dalam menentukan nilai normal, terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan, dan tidak ada pengaturan khusus yang menentukan bahwa harus menggunakan data tertentu.

66. Dalam tabel indikator kinerja Pemohon, angka 1 dan 2 sama sama menunjukkan indikator penjualan dalam negeri, apakah data tersebut terpisah antara nilai dan volume, atau terdapat data yang redundant

Jawab:

Dalam tabel indikator kinerja Pemohon menunjukkan indikator penjualan dalam negeri dari bentuk volume dan nilai, dan bukan data yang berulang.

67. Pada tabel indikator kinerja Pemohon, dapat dilihat bahwa Pemohon masih dapat meningkatkan penjualannya pada periode P3 (Jan-Des 2022) dibandingkan dengan periode P1 (Jan-Des 2020)/ base year, yaitu sebesar 100 angka indeks poin menjadi 116,6 angka indeks poin.

Jawab:

Data dalam permohonan merupakan bukti awal adanya kerugian yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam melakukan analisa bukti awal pada Permohonan, KADI telah menganalisa 15 indikator kerugian yang menunjukkan bahwa Pemohon mengalami kerugian yang terlihat dari menurunnya indikator laba, pangsa pasar, dan tenaga kerja.

68. Pada tabel indikator kerugian juga dapat dilihat bahwa penurunan penjualan dari P2 ke P3 berbanding terbalik dengan peningkatan stok akhir tahun pada

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

periode yang sama. Secara keseluruhan tren penjualan sebesar 7,9%, sedangkan tren stok akhir tahun sebesar 53,3%

Jawab:

Seperti yang telah disampaikan pada jawaban resital 67 di atas bahwa Pemohon mengalami kerugian yang terlihat dari menurunnya indikator laba, pangsa pasar dan tenaga kerja. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan, hampir keseluruhan indikator kinerja IDN yang telah disampaikan pada tabel 4 mengalami penurunan pada tahun 2021-2022

69. Pemohon menyampaikan pada bagian F angka 3 halaman 12 permohonan bahwa porsi ekspor Pemohon kurang dari 1% dari seluruh total penjualan pemohon. Harus diperiksa kembali apakah benar porsi ekspor pemohon kurang dari 1% dari seluruh total penjualan pemohon

Tidak menutup kemungkinan bahwa penjualan ekspor pemohon sebagai salah satu faktor penyebab kerugian pemohon

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada jawaban resital 67 di atas, bahwa KADI telah memeriksa kebenaran data bukti awal maupun jawaban kuesioner Pemohon yang telah diverifikasi dan didapatkan bahwa ekspor Pemohon sebesar kurang dari xx% dari total penjualan ekspornya untuk Barang Yang Diselidiki sehingga tidak mempengaruhi kerugian yang dialami IDN.

D.2. Asosiasi Rotokemas Indonesia

70. Apabila Antidumping Duty di berlakukan, Anggota kami akan sangat terdampak langsung dan dirugikan karena adanya persaingan ketat terhadap barang-barang impor, yang mana akan mengalir produksi kemasan sejenis dari negara tetangga Asia

Jawab:

Sebagaimana di atur dalam PP 34 Tahun 2011, bahwa setiap produsen dalam negeri mempunyai hak untuk mengajukan perlindungan atas Tindakan *unfair trade*. Sedangkan sesuai Pasal 25 PP 34 Tahun 2011, adanya pertimbangan kepentingan nasional akibat dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (bila ada) akan mempertimbangkan keberlangsungan industri dalam negeri yang mengalami kerugian maupun industri pengguna (hilir).

71. Bahwa atas barang Polypropylene *Copolymer* yang termasuk di dalam nomor HS 3902.30.90 terdapat banyak sekali spesifikasi atau grade yang sama sekali belum di produksi oleh PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58 di atas bahwa dalam penyelidikan ini KADI telah mendapatkan masukan dan tanggapan dari

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

beberapa Pihak Yang Berkepentingan, bahwa terdapat beberapa spesifikasi atau grade PP *Copolymer* yang tidak dapat diproduksi Pemohon maupun tidak tersedia di dalam pasar domestik. Oleh karena itu, KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian.

72. Bahwa apabila Polypropylene *Copolymer* yang termasuk di dalam nomor HS 3902.30.90 dengan spesifikasi atau grade yang belum di produksi oleh PT. Candra Asri Petrochemical, Tbk., atau industri petrokimia local kami sebagai pelaku industry plastic hilir, mohon agar produksi dimaksud dikecualikan dari usulan anti dumping tersebut

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 58-59 di atas.

D.3. Korean Producers

73. *Petitioner failed to define the product scope properly in the Petition leading to misleading and excessive coverage of the product scope which prohibits the objective examination on positive evidence as required in Article 3.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement (Agreement)*

Jawab:

Merujuk pada resital 58-59 di atas.

74. *The Petition is based on the selective basis whereby it deliberately without any explanation excluded import of the Product Concerned from Thailand whilst it exported substantial quantity of the product concerned to Indonesia at price at par with other alleged countries*

Jawab:

Berdasarkan data impor yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) harga impor PP *Copolymer* yang berasal dari Thailand lebih tinggi dari harga impor PP *Copolymer* yang berasal dari negara yang dituduh dumping sehingga tidak dapat diperbandingkan.

75. *Our analysis on domestic industry of polypropylene production in Indonesia shows no evidence of injury*

Jawab:

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 PP 34/2011 maupun *Article 3.4 ADA*, bahwa KADI telah mengkaji seluruh faktor ekonomi yang relevan dengan penyelidikan. Hal ini telah disampaikan pada Permohonan yang disampaikan Pemohon maupun dalam penjelasan dalam bagian B.5 Kinerja Ekonomi Industri Dalam Negeri, kerugian IDN ditunjukkan dengan adanya penurunan semua indikator kerugian IDN pada tahun 2021-2022

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

76. *Our analysis of injury factors claimed on the Petition is conflicting with factual information announced by Chandra itself.*

Jawab:

Sebagaimana diketahui bahwa CAP selaku Pemohon merupakan Perusahaan yang tidak hanya memproduksi barang yang diselidiki (PP Copolymer) melainkan meliputi barang lain yang tidak menjadi barang yang diselidiki dalam penyelidikan ini. Kajian Kerugian dalam penyelidikan ini hanya melihat PP Copolymer yang diproduksi dan diperjualkan pada pasar dalam negeri.

77. *No causal link can be established in the Petition.*

Jawab:

Sesuai ketentuan bahwa analisa hubungan sebab akibat meliputi analisa dampak harga maupun dampak volume. Dimana dalam Permohonan, Pemohon telah menyampaikan analisa terhadap dampak volume secara absolut yang menunjukkan adanya kenaikan tren volume impor dari negara-negara yang dituduh dumping maupun analisa dampak harga yang meliputi terjadinya *price suppression* dan *price depression*. Tidak adanya *price undercutting* dari Korea pada tahun terakhir, tidak serta merta menyebabkan tidak adanya hubungan sebab akibat antara dumping yang terjadi dengan Kerugian IDN. Merujuk kepada *Article 3.2 ADA*, bahwa tidak ada satu atau beberapa faktor ini yang dapat paling menentukan.

78. *In Page 2 of the Petition, the Petitioner defined the product scope of the like product and product scope of investigation as polypropylene copolymer ("PPC") under HS Code Number: 3902.30.90 (Copolymer propylene in forms other than liquids and pastes) having characteristic of Physical Characteristics: White pellet solid, odorless, tasteless with a melting point of 160 – 170 °C and a density of 0.89 – 0.91 g/cm³ for impact copolymer (block) type ; point melting 130 – 157 °C and density 0.89 – 0.91 g/cm³ for the random copolymer type.*

We noted, however, that the import of the Product Concerned by the Korean Producers has significant difference in characteristic from the product scope defined by the Chandra which it cannot produced. This clearly implies that Chandra has overstated the definition of the like product and product scope in this investigation which is far beyond its production capability, as a result of which the content of the petition including its presentation of facts is flawed and misleading. As such, there is indeed no legal justification of KADI to initiate the present investigation.

The failure of the Petitioner to correctly define the like product and the product scope will lead to flawed analysis of the facts presented in the Petition including the import statistic as it does not reasonably reflect a fair comparison

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

between what the Petitioner can produce as compared to import of PPC. This is aggravated by the fact that the Petitioners' domestic selling price, as presented in the following section, was overall significantly lower than the landed price of import of PPC into Indonesia.

We recall that Article 2.6 of the Agreement, defines "like product" to mean: "a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration".

The Product Concerned commercially produced the Chandra significantly does not meet the above crucial criteria to determine likeness of its products and existence of competition with import of the Product Concerned from Korea to Indonesia. In the absence of likeness, it will have a factual consequence that imported Product Concerned by the Korean Producers cannot be substituted with the existing limited Product Concerned produced PPC produced by Chandra as the product characteristics, manufacturing process and end-use would be different. As corollary, consistent with the reasoning established in the WTO dispute concerning Border Tax Adjustment we quoted above, the failure of Chandra to correctly define the has misled KADI in the investigation which prevents objective examination is conducted based on objective evidence. As such we request that KADI terminate this investigation

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas bahwa KADI akan mempertimbangkan pengecualian terhadap barang yang diselidiki agar bilamana akan dikenakan BMAD akan tepat sasaran dengan barang yang diproduksi di dalam negeri. Dalam hal ini, KADI telah mendapatkan tanggapan dari seluruh Pihak Yang Berkepentingan yang telah menyampaikan bukti dukung yang dapat diverifikasi, sehingga KADI mempertimbangkan adanya pengecualian barang yang diselidiki dalam penyelidikan ini.

79. *As demonstrated in the import statistic, import from Thailand was significant and skyrocketed in the POI of the price at par with that of Singapore.*

The exclusion of Thailand is deliberately designed to comply with the legal standing requirement under Indonesia GR 34/2011 which prohibits Chandra from being affiliated with inter alia the exporter/producer of the alleged countries. As fully described in below section the indicated Thai producer is a major shareholder of the petitioner which means both are affiliated.

Thus, it is clear that the exclusion of Thailand from the investigation is not based on bona fide reason. Rather, it is based on bad faith so as to avoid legal problem with standing requirement. We should in our view focus on these arguments on top of discrimination. Moreover, the exclusion of Thailand which

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

such as significant volume of import will significantly jeopardize the credibility of investigation of KADI which should lead KADI to terminate this investigation

Jawab:

Merujuk pada resital 56, sesuai dengan definisi Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011, bahwa Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk: a. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; **dan** b. importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.

Sehingga, tanggapan bahwa adanya afiliasi, tidak serta merta membatalkan hak CAP untuk menjadi IDN dalam hal Tindakan Antidumping karena Perusahaan tersebut tidak melakukan impor atas Barang Dumping.

80. *The petitioner is incompetent to satisfy domestic demand of the product concerned, rather, the petitioner intends to create monopoly conditions by unfair petition*

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Chandra") is the only producer of the product concerned in Indonesia. Chandra is an integrated petrochemical company which produces Olefins (e.g., ethylene, propylene), Pygas and Mixed C4, as well as polyolefins (e.g., polyethylene and polypropylene)

Also, according to Chandra's annual reports, its annual production capacity of polypropylene ("PP") is 590 KMT (thousand metric tons) including non-subject PP that is normally "Homo PP" having a single monomer unit, i.e., propylene contributes 95% or more by weight to the total polymer contents, which is currently classified in HS subheading 3902.10 separated from HS subheading 3902.30 of propylene copolymers (PPC).

Meanwhile, there are 2(two) more producers manufacturing PP in Indonesia, however, it is a widely known fact that other producers other than Chandra can only produce Homo PP. In other words, Chandra is the sole producer of the product concerned in Indonesia, that filed the application, i.e., petition for this investigation the vast majority of PP production and sales of Chandra was Homo PP, and this fact means domestic demand for PP copolymer in Indonesian market have had no choice but to procure the product concerned from imported goods

Chandra cannot satisfy domestic demand for the product concerned, even if there is imposition of anti-dumping duty against imports from the subject countries which contribute more than 70% of market share for Indonesian downstream industry.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

the imposition of anti-dumping duty against imports from the subject countries will cause significant increase of imports from Thailand, which is not subject to this investigation.

the second largest shareholder of Chandra is SCG Chemicals Public Company Limited (hereinafter "SCGC"), which is one of the largest integrated petrochemical companies in Thailand.

Therefore, while it is apparent that Chandra has no sufficient ability to meet the increasing domestic demand within foreseeable future, Chandra can create monopoly conditions in Indonesia by blocking the imports from all sources except Thailand using its related company, SCGC.

In this regard, the imposition of anti-dumping duties will give the petitioner an unfair advantage in achieving its monopolistic ambitions.

Jawab:

Sebagaimana di atur dalam PP 34 Tahun 2011, bahwa setiap produsen dalam negeri mempunyai hak untuk mengajukan perlindungan atas Tindakan *unfair trade* meskipun IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan, utilisasi kapasitas IDN masih sangat kecil (kurang dari 20%) dan pasar domestik didominasi oleh impor terutama impor dari negara yang dituduh dengan pangsa pasar lebih dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa alasan para industri hilir untuk melakukan impor bukan karena ketidakmampuan IDN untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Meskipun IDN merupakan satu-satunya produsen dalam negeri yang memproduksi PP *Copolymer*, tidak serta merta dapat membuat IDN melakukan monopoli karena selain IDN, masih ada impor dari negara lain yang mengeksport produk PP *Copolymer* ke Indonesia termasuk Thailand. Selain itu, adanya pengenaan bea masuk anti dumping tidak bertujuan untuk menutup impor. Industri hilir masih dapat mengimpor dari negara yang dituduh maupun negara lainnya. Selanjutnya, apabila dikemudian hari impor dari Thailand terdapat indikasi dilakukan dengan praktik dumping dan merugikan IDN, maka IDN dapat kembali mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping kepada KADI.

81. *No material injury was caused by imports from the subject countries, rather, the petitioner's operating performances have been in line with global petrochemical market situation*

As is well known, market prices in the petrochemical industry are normally determined considering global economic situation

the price trend of crude oil and naphtha produced by refining the crude oil is almost the same. And, the prices of direct raw materials for the production of PP copolymer such as propylene, ethylene, mainly produced by naphtha cracking process (so called NCC) also follow a similar trend. In addition, the

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

price of PP copolymer is very similar with that of propylene, the largest raw material. In other words, the price of the product concerned reflects a market trend of the global oil price.

Price difference between the input and output such as the price differences between naphtha and propylene along with PP copolymer have sharply narrowed in 2022. These narrowed spreads which means the worsening profitability of output, must have had a significant effect on the operating performance of PP copolymer producers all over the world

According to Chandra's management, in 2022, the Chandra's average plant capacity utilization rate reached 77%, a decrease compared to 2021 which was 91%. This was caused by global market slowdown and by routine maintenance. However, capacity utilization of polypropylene was decreased by merely 2% from 92% in 2021 to 90% in 2022. This demonstrates polypropylene market in Indonesia was very strong and far better than other products under the same market and operational condition.

In line with Chandra management explanation in its annual report, because of market disruption caused by outbreak of the war, crude oil and naphtha price was increased significantly. This was mainly related to the increase in raw material costs because of soaring crude oil prices. This condition also caused sharp increase of production costs, which in turn affected the Chandra's operating margins. At the same time, petrochemical products produced by the Chandra were also experiencing price pressure.

This proves Chandra's true confession that the global market trend caused the operating losses in downstream products such as polyolefin, styrene monomer and butadiene because of sluggish demand of downstream products due to global economic situation while realizing high profitability in olefin segments.

The petitioner's operating results were influenced by global geopolitical dynamics, specifically the outbreak of war between Russia and Ukraine in 2022 caused rise in production costs as every other producer in the world, which also has been reiterated in the petitioner's confession in the annual report. Therefore, in accordance with ADA 3.1, the upcoming determination of injury shall be based on positive evidence and involve an objective examination, especially whether there was any impact of imports from the subject countries on domestic industry, i.e., Chandra, rather than "other known factors". And the injuries caused by these other factors must not be attributed to the imports from the subject countries according to ADA 3.5.

Jawab:

Kondisi pasar petrokimia secara global berdampak kepada seluruh produsen PP Copolymer di dunia termasuk IDN dan produsen di negara yang dituduh. Namun demikian, kondisi IDN diperparah dengan adanya praktik dumping yang dilakukan oleh produsen di negara yang dituduh dengan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

adanya bukti dumping yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh IDN. Hal ini terlihat dari harga jual PP *Copolymer* IDN yang semakin menurun dan bahkan pada tahun 2022 IDN menjual dengan harga dibawah harga pokok penjualannya.

82. *Petitioner's injury indicators are totally distorted. thus, positive evidence regarding the upcoming result of investigating authority's objective examination should be disclosed in a transparent manner*

The Petition simply provided Chandra's injury indicators as follows without any positive evidence or sufficient explanation. However, in the Petition, although Chandra tried to find the excuse of unfavorable change of injury indicators from dumped imports, it completely failed to provide any positive evidence on its assertions

The petition insisted that the decrease in domestic sales volume in P3 (2022) is due to increased imports from the subject countries. On the contrary, the petitioner's annual report explained the main reason of decrease of domestic sales was slow-down of global economy caused by global geopolitical dynamics, specifically the outbreak of war between Russia and Ukraine.

PP sales volume was decreased by merely 1.3% compared to 13.7% decrease of total volume of all products. It is completely unreasonable to say how the best performed PP products was decreased by imports from the subject countries. The negligible decrease of Chandra's sales volume in 2022 should be interpreted quite favorable considering the fact that it faced the operational problem under slow global economy caused by outbreak of war between Russia and Ukraine

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 80.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2021-2022 volume penjualan IDN mengalami penurunan sebesar 1,1%. Namun demikian, penurunan tersebut tidak dapat dianggap *negligible*, dimana pada tahun yang sama produksi mengalami penurunan sebesar 17,8% bahkan utilisasi kapasitas IDN tidak sampai 20% selama 2020-2022. Selain itu, pada tahun 2021-2022 disaat konsumsi nasional mengalami peningkatan, justru penjualan IDN mengalami penurunan, dimana volume impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dari 316.168 MT pada tahun 2021 menjadi 331.457 MT pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 4,8% dengan pangsa pasar sebesar 71% pada tahun 2021 menjadi 73% pada tahun 2022.

83. *The petitioner, Chandra claims there was absolute volume effect simply because import volume from subject countries were continuously increased from 2020 to 2022. Also, it further argues there was relative volume effect because market share of imports from the subject countries was increasing, while Chandra's market share was continuously decreased during the injury*
-

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

investigation period. However, Chandra's argument without any positive evidence is totally misunderstanding.

it is obvious the domestic demand for PP copolymer increased consistently over the injury investigation period. The total domestic demand for the PP copolymer had increased 26% in 2022.

the import volume from the subject countries had increased by 24% in 2022, the import volume from the non-subject countries including Thailand had increased by 43% in 2022. In the meantime, domestic sales volume of the sole domestic industry, Chandra also increased by 18% in 2022. The lowest increase rate of sales volume implies that Chandra's lack of production ability to satisfy the downstream customers' requirements.

As a result, there were no significant change in the market share to domestic demand. Rather, Thailand had showed the highest growing trend in market share among all countries, while the market share of imports from the subject countries had declined. That is to say, the relative volume effect of Chandra's sales, if any, was made because of imports from Thailand rather than imports from the subject countries.

conclusion, it should be noted that a significant market share of the subject countries cannot be interpreted as cause of volume effect as Chandra argues, because this was caused by lack of production ability of Chandra to satisfy downstream customer's requirements, which is absolutely no correlation with the imports from the subject countries.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 74-81

84. *Chandra insists there was a price undercutting because import price from Vietnam and UAE in P3 (2022) was lower than Chandra's domestic sales price. Also, Chandra further argues there was price suppression, because Chandra's domestic sales price was lower than its cost of sales*

the import prices from Korea, Malaysia and Singapore were higher than Chandra's domestic sales price, while the import prices from Vietnam and UAE were lower than Chandra's domestic sales price.

The import volumes of Vietnam and UAE were small, i.e., total 28 KMT compared to 303 KMT from import volumes of the rest, i.e., Korea, Singapore, and Malaysia. As a result, average import price from the subject countries is US\$1,452/MT was 6.8% higher than Chandra's domestic price of US\$1,360/MT. Accordingly, no price undercutting has been observed by higher priced imports from the subject countries for the entire period of injury investigation.

Jawab:

Merujuk jawaban pada resital 77

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Berdasarkan hasil penyelidikan *price undercutting* hanya terjadi terhadap PEA selama tahun 2020-2022. Namun demikian, meskipun tidak adanya *price undercutting* dari negara yang dituduh lainnya, hal ini tidak dapat dianggap negara yang dituduh lainnya tidak memberikan dampak terhadap kerugian IDN. Terlihat dari harga IDN yang mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 namun IDN masih belum mampu meningkatkan penjualannya. Selain itu, pada tahun yang sama terjadi *price depression* dan *suppression* dimana harga IDN mengalami penurunan untuk tetap dapat melakukan penjualan bahkan sampai harus melakukan penjualan dibawah harga pokok penjualannya.

85. *Second, there was no price suppression because Chandra's production cost was increased mainly due to raw material cost as explained by Chandra itself.*

The increase of its cost of sales in 2022 was caused by the increase in the raw material prices as explicitly mentioned by Chandra, "The price of naphtha sharply increased from around US\$659/MT to US\$815/MT, and this increase is in line with the increase in crude oil price." That is to say, the main reason of increase of Chandra's COGS was a rapid increase of crude oil and naphtha price due to out-break of war. In 2022, as everyone knows, there was rapid and steep surges in the international oil prices due to the Russia-Ukraine War under the devastation of COVID-19. The flow of oil, natural gas and refined products like diesel has been upended unexpectedly, leading to one of the largest shifts in the global energy market in decades.

This economic condition caused production costs to also increase, which in turn affected the Chandra's operating margins resultingly, whereas global copolymer price was experiencing price pressure.

it is clear there was no price undercutting, price depression or suppression during the injury investigation period on the contrary to Chandra's absurd claims.

Jawab:

Merujuk pada resital 81-84

86. *Chandra tried to find the excuse of operating loss in 2022 from the imports from the subject countries. However, Chandra's claim is totally absurd, which also conflicts with its own explanation through the annual report in the annual report, Chandra's managements explicitly mentioned that "because of out-break of the war, this was mainly related to the increase in raw material prices because of soaring crude oil prices. This condition caused production expenses to also increase, which in turn affected the Company's operating margins." Furthermore, Chandra's operational problem related with production facilities also played a significant role for operating loss in 2022. In other words, as Chandra confessed, the main reason of worsened profitability in*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

PPC sector is the rise in crude oil had a significant influence on Chandra, as cost of production dramatically increased.

PP copolymer (PPC) is no exception. PP products including PPC normally produced using raw materials, i.e., propylene, ethylene produced from prior process such as NCC (naphtha cracking process), and naphtha is produced by refining the crude oil. Thus, there is a strong correlation between the manufacturing cost of PP and naphtha price. Moreover, structure of production cost for Homo PP and PPC is very similar with each other KADI should review whether Chandra's Petition properly calculated the manufacturing costs of the prior production process including its joint cost allocation incurred in NCC and refining processes. Since PPC only accounted for small portion of PP business of Chandra for the injury investigation period, the injury Chandra claimed, if any, must have been caused by non-subject PP other than PPC.

Jawab:

Merujuk pada resital 79-83

87. *In the Petition, Chandra complained it could not increase production capacity and its capacity utilization was decreased in 2022 because of dumped imports from the subject countries*

According to Chandra's management for 2022, "Chandra's average plant capacity utilization rate reached 77%, a decrease compared to 2021 which was 91%. This was caused by routine maintenance and unplanned shutdown in UCC2 plant." On the contrary, as noted above, capacity utilization of polypropylene was decreased by merely 2% from 92% in 2021 to 90% in 2022. This demonstrates polypropylene market in Indonesia was very strong and far better than other products under the same market and operational condition.

In this wise, as Chandra confessed, there was no material injury regarding its production activities related with PPC during the injury investigation period, in terms of its actual records sourced from Chandra itself.

Jawab:

Pernyataan yang disampaikan oleh IDN dalam laporan tahunan merupakan kondisi keseluruhan perusahaan yang tidak hanya mencakup produk PP Copolymer saja. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan selama tahun 2020-2022 kapasitas terpasang IDN sebesar xx MT dengan utilisasi kapasitas kurang dari 20% dimana penjualan IDN pada tahun 2021-2022 kurang dari xx MT sedangkan konsumsi nasional mencapai lebih dari 400.000 MT pada tahun yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa impor dari negara yang dituduh dumping memberikan dampak negatif bagi kerugian IDN.

88. *Other injury indicators such as inventory, employment and wages show more favorable to Chandra in 2022 than 2021. And other unfavorable indicators such as productivity, cash flow, growth rate and capital increase are mainly*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

related to operating losses in 2022 because of slow global economy and operational problems

Jawab:

Merujuk pada resital 79-83.

Berdasarkan hasil penyelidikan, terjadi kerugian yang dialami oleh IDN yang ditunjukkan dengan adanya penurunan di semua indikator kinerja IDN akibat praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir/produsen di negara yang dituduh yang ditandai dengan adanya dampak harga dan dampak volume.

89. *First, Chandra unfairly filed the Petition requesting the imposition of antidumping duty against imports from the subject countries for the benefit of SCGC, a related company in Thailand, because its production capacity is incompetent to meet domestic demand. Since Chandra has postponed the CAP2 Final Investment Decision considering the economic uncertainties, Chandra cannot satisfy the increasing demand of domestic downstream customers in near future. Especially, a fair decision must be made whether it is a proper answer to considerations of "national interest" in Indonesia to grant a monopoly in this regard.*

Jawab:

KADI melakukan penyelidikan anti dumping untuk membuktikan terjadinya dumping yang menyebabkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri. Sedangkan sesuai dengan Pasal 25 PP 34 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Perdagangan akan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam memutuskan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.

90. *Second, a few unfavorable injury indicators in 2022 was made due to global economy slowdown cause by outbreak of war between Ukraine and Russia rather than imports from the subject countries. Those indicators were not related with the imports from the subject countries, rather, there was no exception in this suffering situation throughout the world including Chandra.*

Jawab:

Merujuk pada resital 79-83

91. *Third, there has been no significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to consumption in Indonesian market. Both the import volume and Chandra's sales volume were concurrently increased in proportion to increased domestic consumption. Rather, the increase of imports from Thailand caused the decrease of market share of Chandra's domestic sales. Therefore, KADI should scrutinize the injury indicators that Chandra provided in the Petition and shall provide any positive evidence to the interested parties in a transparent manner regarding the correlation between the imports and the injury Chandra claimed.*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Sebagaimana disampaikan pada bagian Hubungan Sebab Akibat, KADI telah menentukan bahwa terjadi Dampak Volume baik secara absolut maupun relatif terhadap konsumsi nasional yang diakibatkan meningkatkan volume impor dari negara impor dumping.

92. *Fourth, there was no price undercutting, because import price from the subject countries was higher than Chandra's sales price during the injury investigation period. Also, no price suppression was caused by import price from the subject countries because both prices of domestic and import were in line with the international market price. Rather, it followed market mechanism such as supply and demand, such as the sluggish downstream industrial activity affected by macroeconomic environment.*

Jawab:

Merujuk pada resital 79-83

93. *Finally, in the present investigation, as the petitioner is the sole producer in Indonesia, there is a high likelihood that it would dominate the market and would create unfair barriers for market entry. Therefore, in the upcoming determination, it should be considered that the imposition of unnecessary anti-dumping duties is harmful to the competitive and healthy development of Indonesian industry, and consequently will have negative impact on the national interest.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 89, bahwa Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam memutuskan pengenaan BMAD.

D.4. Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge) - Sole Proprietorship LLC ("ADP") dan Borouge Pte. Ltd. ("PTE")

94. *As detailed below, Borouge respectfully requests KADI to terminate the Investigation because imports from the UAE are effectively de minimis. In any event, KADI should disregard the injury arguments of petitioner in this case, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ("Petitioner") as we find the following points:*

1. *There is publicly available information showing Petitioner's injury claims are baseless.*
2. *There is no ground to the claim that losses suffered by the Petitioner is caused by export of PPC products of ADP.*

Jawab:

Merujuk pada resital 74-75 dan 79-83.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Berdasarkan hasil penyelidikan, ADP terbukti melakukan praktik dumping dan ditemukan margin dumping sebesar 29,42%. Sesuai *Article 5.8 Anti Dumping Agreement* bahwa margin dumping yang dianggap *de minimis* adalah kurang dari 2% sehingga penyelidikan tidak dapat dihentikan.

95. *We refer to Petitioner's injury claim as summarized in sections C to F of the non-confidential version of its petition dated 26 June 2023 ("Petition"). An analysis of the petition and other publicly available information demonstrates that, in sum, Petitioner is not materially injured and that, in any event, any injury is not caused by purportedly dumped imports but by technical problems and temporary oil price increases in 2022..*

Jawab:

KADI telah melakukan analisa permohonan yang disampaikan Pemohon yang memuat bukti awal sebagaimana diatur dalam *Article 5.3 ADA*: “*The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation*” dan Pasal 7 PP 34/2011. Sehingga berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan, KADI memutuskan untuk menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan.

96. *In Section 2.1, Borouge demonstrates that its PPC products largely do not compete with Petitioner's products. As demonstrated in Section 2.2, the volume of imports from the UAE is effectively de minimis, when considering the volume of actually competing imports. The Investigation should be terminated accordingly.*

In any event, imports from the UAE should not be cumulated with other imports for the purpose of the injury analysis. Imports from the UAE alone shows that there is no significant volume effect.

Jawab:

Sesuai *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* bahwa “.... *the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.*” Berdasarkan hasil penyelidikan, persyaratan tersebut telah terpenuhi bagi otoritas untuk melakukan *assessment* secara kumulatif.

97. *Section 2.5 demonstrates that, in any event, there is no undercutting or price suppressions from all imports (or from imports from the UAE). That is in line with, as detailed in Section 2.6, the fact that Petitioner is in glowing economic*
-

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

health, with only a minor blip in its performance in 2022. This blip is caused by technical problems at Petitioner in 2022 as well as by temporarily high costs due to soaring oil prices

There is, therefore, no injury to Petitioner – even if there were any injury, that injury is caused by factors other than purportedly dumped imports.

Jawab:

Merujuk jawaban pada resital 79-83

98. *As an initial point, most of Borouge's PPC products sold on the Indonesian market are not in direct competition with PPC products produced by Indonesian producers because their technical specifications differ. Broadly speaking, Borouge's PPC products are used in three applications*

In two categories of use, namely RPP cast films in general and PP Blocks for automotive components, there is no domestic competitor to Borouge for the same grade and quality as Borouge. In the remaining category, rigid packaging and household appliances, although there are equivalent products in Indonesia, the grades have different technical specifications, which means the use scenarios are different. As a result, in general, Borouge's supply segment differs from that of the Petitioner, even within the same category of customers.

Jawab:

Sebagaimana telah dijelaskan pada resital 58-59 di atas, KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini.

99. *As set out in Article 5.8 of the ADA, KADI must terminate the Investigation whether the volume effect of imports of PPC products from the UAE is below 3% of the volume of total imports.*

volume and value of Borouge's export to Indonesia in terms of volume for the 2020-2022 injury period and 2023 based on official import statistics. Recent statistics show that imports decreased significantly again.

Borouge's PPC products largely do not compete with Petitioner's PPC products. KADI should consider the true impact of imported PPC products by limiting its inquiry to imported products that actually compete with domestically produced PPC products. KADI should thus disregard imported products that do not actually compete with domestically produced products.

KADI should terminate the Investigation as concerns imports from the UAE because relevant imports from the UAE are de minimis.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, volume impor PEA memiliki volume impor lebih dari 3%. Sesuai dengan *Article 5.8 Anti Dumping Agreement* bahwa volume impor yang dianggap *negligible* adalah kurang dari 3% sehingga penyelidikan terhadap PEA tidak dapat dihentikan.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

KADI telah menentukan bahwa periode penyelidikan dalam hal kerugian adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Sesuai data BPS pada tahun 2020-2021 volume impor dari PEA memang mengalami penurunan sebesar 25% namun pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 89%.

Sesuai resital 20, KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini.

100. *If KADI does not consider that imports from the UAE are de minimis (which they are), KADI should not cumulate imports from the UAE with other imports for the purpose of the Investigation.*

First, the volume of imports from the UAE that actually competes with Petitioner's products is negligible in the sense of Article 3.3 of the ADA. It is impossible for such a low volume of competing products to have any material impact on the performance of Petitioner.

Second, the conditions of competition between PPC products do not warrant cumulation of imports. There are substantial differences in terms of technical specifications between Borouge's products and Petitioner's products.

In addition, during the investigation period, Borouge's products are subject to MFN import duty rate of 10%, while imports from South Korea, Vietnam, Malaysia and Singapore are benefited from preferential free trade agreement with the rate of 0% based on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Trade in Goods Agreement ("ATIGA"), and ASEAN-Korea Free Trade Agreement (FTA). This competitive benefit explains why imports from South Korea and Singapore make up a large part of Indonesian imports. In the case of Singapore, the benefit is compounded by lower logistical costs compared to other imports.

The fact that, despite this 10% additional import duty, Borouge still made a modest number of sales to Indonesia confirms that its products do not compete with other PPC products on the Indonesian market. Indeed, if Borouge's products would be close equivalents to products from Petitioner or from manufacturers in the said countries, its exports to Indonesia would have been close to zero, since there is no reason for customers to import products that, after adding all import taxes, are more expensive. This corroborates that Borouge serves different customers' needs than Petitioner.

Jawab:

Pengenaan BMAD bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami industri dalam negeri dengan membuat tingkat perdagangan yang sama (*same level playing fields*). Sebagaimana diketahui saat ini hingga ditetapkannya pengenaan BMAD dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka belum ada pengenaan BMAD terhadap barang impor dari negara yang dituduh dumping. Selain itu, Indonesia dan PEA memiliki perjanjian ekonomi komprehensif yang

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

berlaku pada tahun 2023 sehingga Bea Masuk dari PEA akan menjadi lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perlu diingat, bahwa perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap mitra bila terbukti melakukan *unfair trade* (dumping), maka dapat dikenakan BMAD.

101. *While imports from the UAE increased from 2020 to 2022, there is no "significant increase ... either in absolute terms or relative to production or consumption" in Indonesia.*

It follows that there is no volume effect of imports from the UAE and that, accordingly, imports from the UAE do not contribute to any injury suffered by Petitioner

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 98

102. *First, according to Petitioner, there is no price undercutting by imports from Malaysia, Singapore or South Korea. Imports from these countries account for the bulk (up to 75%) of all imports and, according to Petitioner, 60% of consumption. In contrast, Petitioner claims that imports from the UAE and Vietnam undercut its prices, whereas these imports account for less than 10% of all imports and, according to petitioner, less than 6% of consumption*

Second, in any event, Petitioner's undercutting calculation for imports from the UAE is flawed. Petitioner alleges that Borouge undercut prices by 2.5% in 2020, 11.8% in 2021 and 10.8% in 2022 (please refer to the above snippets). For this calculation, Petitioner used CIF prices, which disregard the 10% import duty payable on imports from the UAE. In addition, there are costs related to importing that are not caught by CIF prices, including up to 10% import withholding tax. Thus, real-world customer prices of imports from the UAE are (at least) 10% higher than CIF prices. This cancels out all alleged undercutting.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, terjadi *price undercutting* atas impor dari PEA selama tahun 2020-2022 dan harga impor dari PEA telah memperhitungkan bea masuk MFN serta *Terminal Handling Cost*.

103. *Third, Petitioner does claim that imports from South Korea and Singapore suppress prices. This claim is contradicted by Petitioner's own pricing information, which shows that from 2021 to 2022, most exporters increased their price significantly. How can there be price suppression due to imports when most exporters raised their prices?*

In addition, Petitioner's sales prices went up by 25% from 2020 to 2022 – which contradicts Petitioner's price suppression claim – and it had high margins between its cost of goods sold and sales price in 2020 and 2021. In 2022,

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

costs increased drastically and, as a result, Petitioner sold at a small loss of less than 1% of the cost of goods sold.

It is insufficient to consider only Petitioner's prices and its cost of goods sold to conclude that there is price suppression

As Petitioner sharply increased its sales prices during the injury period and made healthy margins (except for small losses in 2022), there is no price suppression and, in any event, no significant price suppression that can be tied to imports.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 83

104. *An examination of all relevant economic indicators shows that there is no evidence that Petitioner has been negatively impacted by imports as Petitioner's economic factors and indices are positive.*

First, Petitioner's domestic sales volumes went up significantly, by 17% and 47%, during the injury period. At the same time, Petitioner's domestic sales prices went up significantly by more than 25%.

Second, while Petitioner's market share decreased slightly, this is due to a growing market as the absolute sales volume of Petitioner's domestic sales increased sharply. As a result, capacity utilization rates went up, as well as productivity.

Third, Petitioner made very healthy margins in 2020 (19.2% on cost of goods sold) and 2021 (20.8%). A minor loss in 2022 (1.2%) does not cancel out these profits. In any event, there is no explanatory force from imports for this loss as there is no significant undercutting and no evidence at all of price suppression. The key problem for Petitioner was an increase in cost of goods sold in 2021 and 2022.

Fourth, Petitioner claims negative return on investment, cash flow, and capability to raise capital. However, Petitioner admitted that its data on these indicators refers to the Petitioner's whole business, not just PPC. As polypropylene sales (the business unit in which PPC sales fall) represents only 24-28% of Petitioner's sales, this methodology is flawed and cannot be accepted.

Fifth, Petitioner's Earnings Call FY 2022 highlighted that its sales of polypropylene were higher than its production capacity

Accordingly, the figures suggest that Petitioner's has a healthy polypropylene (PP) business, as Petitioner has been able to run its assets at a significantly higher rate than the global industry as an average.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan IDN mengalami kerugian dengan ditandai adanya penurunan semua indikator kinerja IDN, sebagaimana disampaikan pada resital 39 sampai dengan 46 terutama pada indikator laba yang menunjukkan angka minus (rugi) pada tahun 2022.

105. *Petitioner's own annual report confirms that any injury suffered by Petitioner is caused by other factors, not by purportedly dumped imports.*

First, Petitioner's cracker plant was shut down from 1 November to 31 December 2022 due to technical issues. This very long downtime of a key part of Petitioner's business is bound to have affected Petitioner's profitability for 2022, which is the only year in the injury period in which Petitioner's profit was deteriorated.

Second, Petitioner stated that its financial conditions were adversely affected mainly due to increased costs (resulting from high oil prices) and a lack of demand resulting from a continued slowdown in China.

Fourth, Petitioner's Annual Report 2020 on profitability also noted adverse effect of the pandemic, which is understandable given that the pandemic was very much at its height at that time..

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 103

Laporan tahunan perusahaan merupakan laporan yang mencakup keseluruhan produk. Penyelidikan ini hanya mencakup produk PP Copolymer.

106. *Finally, in relation to the progress of this investigation to date, Borouge, as a UAE company, wishes to note the goal of achieving transparency that is outlined in Chapter 7 regarding Trade Remedies of the Indonesia – UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement ("CEPA"). We note in particular the following practices that are recognized by Article 4 of this Chapter as promoting transparency*

Finally, Borouge notes that it reserves its right to make additional submissions to KADI concerning the Investigation, as needed.

Jawab:

Sebagaimana diatur dalam PP No. 34/2011 maupun IUAE CEPA telah diatur mekanisme untuk Pihak Yang Berkepentingan menyampaikan tanggapan maupun sanggahan dalam penyelidikan. Sepanjang argumentasi yang disampaikan dilengkapi dengan bukti dukung yang menguatkan, yang dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga dapat dipertimbangkan KADI dalam mengambil keputusannya.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

D.5. ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.

107. *In this context, we submit that the Vistamaxx™ performance polymer product produced by ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (“EMAPPL”) – though falling within the HS Code 3902.30.90 – does not fall within the scope of the Product Concerned and should therefore be excluded from the Investigation. We elaborate on this in Section C below, after setting out the legal basis for this submission.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian atas barang yang diselidiki.

108. *Defining the PUC sets clear guidelines on the object or scope of any anti-dumping investigation. Although there is no explicit definition of “product under consideration” in the WTO Anti-Dumping Agreement, Article 1 paragraph 26 of GR 34/2011 clearly states that the PUC is “the imported goods which become the object of anti-dumping investigations ... given by the description and goods specification and tariff heading numbers according to Indonesian customs tariff book”. In the context of this Investigation, the PUC is further defined in KADI’s questionnaire to exporters.*

Jawab:

Penentuan barang yang diselidiki dalam tahap Permohonan berdasarkan masukan dari Industri Dalam Negeri (Pemohon), mengingat bahwa sumber informasi dalam tahap Permohonan adalah Pemohon. Sesuai dengan perkembangan penelitian dalam penyelidikan, KADI memandang perlu dilakukan penyesuaian dalam menentukan barang yang diselidiki. Sebagaimana disampaikan pada resital 58-59 di atas, dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

109. *The definition of the PUC also affects the determination of dumping margin calculations, the extent of injury to the domestic industry, and analysis of the causal link between the alleged dumped imports and the alleged injury suffered by the domestic industry.² Thus, it would be inconsistent with Articles 2 and 3 of the ADA if there were to be a product included within the definition of the PUC, which is not a “domestic like product” (ie, identical to the domestic industry product).*

Jawab:

Betul bahwa penentuan barang yang diselidiki akan mempengaruhi perhitungan margin dumping, analisa kerugian dan dampak hubungan kausal diantaranya. Salah satu alasan KADI memperpanjang waktu penyelidikan adalah karena banyaknya masukan dari Pihak Yang Berkepentingan dalam

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

penyelidikan yang menyampaikan perlunya adanya pengecualian, sebagaimana telah dijelaskan pada resital 58-59.

110. *As explained in Section B above, a product shall not be included in the scope of the PUC in any investigation if it is not a “like product” to the product manufactured by the domestic industry. In the context of this Investigation, we submit that for the reasons set out below, Vistamaxx™ performance polymer*

Jawab:

KADI telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemohon, Kementerian Perindustrian, DJBC maupun dengan perwakilan eksportir produsen, dalam hal pengecualian terkait dengan PP Copolymer yang termasuk elastomer, disepakati untuk dikecualikan karena tidak termasuk barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri.

111. *First, there are clear differences in the chemical and physical properties of Vistamaxx™ performance polymer when compared to the domestic product. This is clear when we compare their respective Product Control Numbers (“PCNs”):*

- a. *Vistamaxx™ performance polymer has a broad density range compared to the PUC – between 0.862 and 0.889 g/cm³, compared to the PUC’s range of 0.89 to 0.91g/cm³.*
- b. *Vistamaxx™ performance polymer also has a melting point lower than 130°C, while the PUC has a melting point falling within the ranges of 130–157°C, or 160–170°C*
- c. *As for the melt flow rate, the Vistamaxx™ performance polymer products again fall across a broad range compared to the PUC – there are some Vistamaxx™ performance polymer grades which have a melt flow rate of less than 4.5g/10 min, and others which have a melt flow rate far above 55g/10 min.*
- d. *While Vistamaxx™ performance polymer is used in similar end uses as the PUC, there is a significant difference in its applications. We elaborate on this below.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

112. *Second and more importantly, Vistamaxx™ performance polymer is a unique speciality product that is not used in the same way as general polypropylene products (such as those produced by PTCA).*

Due to its unique polymer attributes (such as toughness, cling, sealability, softness, clarity, dispersion, adhesion, elasticity, and flexibility), Vistamaxx™

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

performance polymer can be used to create new possibilities for product innovation, and adds value in end-product applications for industries such as automotive, building and construction, consumer, hygiene and packaging. Vistamaxx™ performance polymer is typically used as a polymer modifier in small to moderate amounts, to enhance the performance of base polymers such as polyethylene and polypropylene by providing versatility, increasing compatibility and costs savings, and enhancing the performance of recycled polyethylene and polypropylene content.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

113. *It is therefore clear that Vistamaxx™ performance polymer does not constitute a “like product” when compared to the PUC, particularly the PUC manufactured by the domestic industry.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

114. *In view of the above, we respectfully request KADI to exclude Vistamaxx™ performance polymer as a PUC in this Investigation, and accordingly exclude Vistamaxx™ performance polymer from the dumping margin calculations and injury and causal link analyses.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

D.6. Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. (“LCTM”)

115. *More concretely, as we will further elaborate below, the main reasons for KADI to reject the petition on its face or immediately terminate the present investigation among others due to the following fundamental facts:*

The Petitioner failed to properly define the product scope, causing fundamental flawed presentation of facts and analysis in the Petition which prevents objective examination of positive in this investigation;

Exclusion of significant volume of import from Thailand even further jeopardies the credibility of the petition and it leads to selective and discriminative investigation;

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

There is no sufficient prima facie evidence of dumping, injury and causality as required in Article 5.2 and 5.3 of the Agreement

No adequate non-attribution analysis in the Petition

The imposition of anti-dumping duty would harm Indonesia's national interests

Jawab:

Permohonan yang disampaikan CAP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PP 34 Tahun 2011 maupun *Article 5.2 ADA*, Dimana terdapat bukti awal yang cukup mengenai adanya Barang Dumping, Kerugian dan hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan terkait dengan adanya Perusahaan afiliasi di Thailand, sebagaimana telah dijelaskan pada resital 57, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011, tidak serta merta membatalkan hak CAP untuk menjadi IDN dalam hal Tindakan Antidumping karena Perusahaan tersebut tidak melakukan importasi Barang Dumping.

116. *The Petitioner failed to properly define the product scope in the Petition*

On pages 3 and 4 of the Petition, the Petitioner simply defined the product scope of the like product and product scope of investigation as Polypropylene Copolymer (PPC) under HS Code Number: 39023090 (Propylene copolymers other than in form of liquids or pastes), having physical characteristics: white pellet solid, odorless, tasteless with a melting point of 160 – 170 °C and a density of 0.89 – 0.91 g/cm³ for impact copolymer (block) type ; melting point 130 – 157 °C and density 0.89 – 0.91 g/cm³ for the random copolymer type.

The two references we provided above clearly suggest that, despite the Petitioner's efforts to cover an overly broad range of product concerned in this investigation, its capability in the production and sales of the product concerned remains limited

It is clear from the definition of the product scope under investigation that the Petitioner's proposal in its Petition is too generic and overly broad. There is no factual support to demonstrate that the Petitioner has the capability to produce the full range of the product concerned.

The table of PCN formulation by KADI above defined the melt flow rate (g/10min) as: 4,5 – 5,5; 8,0 – 12,0; 15,2 – 22,8; 36,0 – 40,0; and 45,0 – 55,0. The gaps in the melt flow rate parameter above indicates that the Petitioner was not able to produce PPC with melt flow rate (g/10min) of: (i) [] (ii) [] and (iii) [], which was produced and exported by LCTM to Indonesia.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, IDN dapat memproduksi semua jenis PP Copolymer. Namun demikian seperti yang disampaikan pada resital 20, KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian dalam penyelidikan ini.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

117. *In terms of volume of sales to Indonesia, the above grades contributed as high as [] out of LCTM's total export to Indonesia during the POI. This means that significant portion of LCTM's export to Indonesia is to meet the demand of customers in Indonesia for grades that cannot be produced by the Petitioner.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

118. *Melt flow rate itself is a measure of how easily a thermoplastic material can flow (flowability) under a specified pressure and temperature and is widely used in the plastics industry to assess the processability and quality of different materials. It is further critical to note that melt flow rate is determined based on the requirement from the LCTM's customers to suit the need in term of production process and application. It is our understanding that the choice of customers to procure such grades from LCTM was solely due to the inability of the Petitioner to produce these grades.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

119. *Pursuant to the like product as defined under Article 2.6 of the Agreement and Article 1.10 of GR 34/2011 supported by the findings in Japan – Alcoholic Beverage, KADI should exclude the grades of subject merchandise in the listed figure above and those grades/types which are not captured on within the range of characteristic presented in the table of the Section of the KADI questionnaire.*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

120. *Given that there is no competition between LCTM's imported product and the Petitioner's product, KADI should also have excluded LCTM from the cumulative injury assessment and instead assessed the effect of LCTM's imported product independently, as regulated by Article 3.3 of the of the Agreement*

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Perhitungan margin dumping terhadap masing-masing Perusahaan yang kooperatif akan mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki, sehingga akan sesuai dengan Analisa Kerugian Pemohon maupun Analisa dampak (hubungan kausal terjadinya Kerugian akibat Barang Dumping).

121. *the Petition does not represent proper and appropriate data and analysis due to (i) the HS Code and product scope being excessively broad, including the grades that cannot be produced by the Petitioner and (ii) the majority of imports from LCTM do not represent the products or grades of PPC that Petitioner can produce*

It should also be noted that the Agreement provides clear and strict requirements to initiate an investigation in which the authorities is required to examine the accuracy and the adequacy of evidences presented in the petition prior to initiate the investigation

Article 5.2 of the Agreement clearly underlines the standard and basic requirements for the initiation of investigation and prohibits the mere use of simple assertions that cannot be substantiated by the relevant evidence. Meanwhile, Article 5.3 of the Agreement furthermore stresses the authorities' obligations to examine the accuracy and adequacy of data and evidence presented to them in the application, instead of just merely accepting what was submitted by the Petitioner in the Petition, prior in deciding to initiate the investigation.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 115 di atas, bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan bukti awal sebagaimana di atur dalam Pasal 5.2 ADA dan Pasal 4 ayat (4) PP No. 34 Tahun 2011, yang memuat adanya Barang Dumping, Kerugian dan hubungan sebab akibat antara Barang Dumping, Kerugian dan hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh Pemohon.

122. *In assessing the adequacy of the application, KADI should not have only exclusively relied on the information submitted by the Petitioner. It should also include an examination of facts known to KADI and facts readily at KADI's disposal, such as information which were publicly available such as the Petitioner's annual reports. An investigation should therefore only be initiated after a thorough examination conducted by the authorities on the sufficiency of the prima facie evidence presented to them*

The Petitioner's failure to properly defined the product scope, caused fundamental flawed presentation of facts and analysis in the Petition. This failure also has led to misleading prima facie evidence for injury and causality in the Petition. Thus, it is evident that the Petitioner violates Article 5.2 and 5.3

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

of the Agreement. Given these critical facts, KADI should terminate this investigation.

Jawab:

KADI telah melakukan analisa atas bukti awal yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan sehingga KADI memulai penyelidikan anti dumping atas produk PP Copolymer yang berasal dari Korea, Vietnam, PEA, Malaysia, Singapura. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dan hasil verifikasi Pihak Yang Berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan, KADI menemukan bahwa telah terjadi dumping dari perusahaan-perusahaan eksportir produsen dari negara yang dituduh dengan besaran 10,57%-82,83% yang menyebabkan Kerugian pada Industri Dalam Negeri yang ditunjukkan dengan menurunnya hampir di semua indikator kinerja IDN. Selain itu, dapat dilihat pada Bagian B.5. Hubungan Sebab Akibat bahwa terjadi dampak volume dan dampak harga.

123. *The Petition discriminatively excluded import of the product concerned from Thailand*

The Petitioner has discriminatively excludes Thailand from the Petition despite the fact that Thailand has the third largest export of product concerned to Indonesia during the POI

Thailand's import share also reached 13% in the POI, even higher than several of the alleged countries namely Malaysia, Vietnam, and UAE

- (i) import share of Thailand was significantly above 3%; (ii) similar level of pricing between import from Thailand and at least Malaysia (iii) Thailand's import price dropped in the POI. As such, it is unjustified to exclude import of the product concerned from Thailand from this investigation*
- (ii) If the reason of the exclusion was focused on the import price of Thailand then this should also apply for Malaysia and Singapore as based on table in page 10 of the Petition it was established that the import price of PPC from both Malaysia and Singapore was significantly much higher than that of the Petitioner's therefore did not undercut the domestic selling price of the Petitioner.*

We believe however that Thailand's exclusion in this investigation was deliberately designed to fulfil legal standing requirement under Article 1.17 of GR 34/2011 whereby it strictly exclude Indonesian producer having relationship with producer/exporter in the alleged country from the definition of domestic industry. In fact, the known Thailand producer namely, SCG Chemicals Public Company Limited, is one of the major shareholders of the Petitioner. This can be seen from the Petitioner's 2022 Annual Report

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Therefore, the exclusion of Thailand from the investigation is solely a bad faith trick of the Petitioner to avoid legal standing problem as required in Article 1.17 of GR 34/2011 which is indeed unjustified by the fact we presented above. As a consequence, the Petition filed by the Petitioner is biased, subjective, cherry-picking and clearly violates Article 5.2 of the Agreement, read together with the Article 3.1 Agreement which mandates that the determination of injury shall be based on positive evidence and involve an objective examination.

Jawab:

Berdasarkan data dari BPS ditemukan bahwa harga impor dari Thailand berada di atas harga impor dari negara yang dituduh dumping. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya dumping atas impor produk PP Copolymer yang berasal dari Thailand. Namun jika suatu saat impor dari Thailand terindikasi dilakukan dengan praktik dumping dan merugikan IDN, maka IDN dapat mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping terhadap Thailand.

124. *In light of the above facts and explanation, we view that the quality of the evidence presented in the Petition has overall impacted on the objectivity of the investigation which would undermine KADI's subsequent determination due to the improper definition of the product scope and exclusion of Thailand from the Petition. Therefore, we request that KADI immediately terminate this investigation.*

Jawab:

Sebagaimana diatur dalam Article 5.8 ADA bahwa permohonan harus ditolak dan penyelidikan segera dihentikan bila margin dumping *de minimis* (kurang dari 2%) atau volume impor barang dumping baik secara aktual maupun potensial *negligible* (kurang dari 3%). Permohonan yang disampaikan maupun penyelidikan KADI membuktikan bahwa telah terjadi dumping yang tidak *de minimis*, yang menyebabkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri Sebagaimana telah dijelaskan pada resital 122 di atas.

125. *Insufficient prima facie evidence on injury in the Petition*

Overall, as we presented above, the injury and causality analysis of the Petitioner in the Petition is no longer valid, and it should have been rejected by KADI due to its failure to properly define the product scope and unjust exclusion of significant import of the product concerned from Thailand

Furthermore, Malaysia especially LCTM is to be decumulated for the purpose of injury and causality analysis in this in this investigation due to the facts (1) its product imported into Indonesia do not compete with the Petitioner's and (2) its import price was significantly much higher than that of the Petitioner's domestic selling price. Moreover, our analysis below reinforces the fact that the entire performance of the Petitioner was significantly impacted by the

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

global situation which would not be attributable to import of PPC from Malaysia, especially LCTM.

Jawab:

KADI telah melakukan analisa permohonan yang disampaikan Pemohon yang memuat bukti awal sebagaimana diatur dalam *Article 5.3 ADA*: “*The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation*” dan Pasal 7 PP 34/2011. Sehingga berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan, KADI memutuskan untuk menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan.

126. *It should first noted that market prices in the petrochemical industry are typically influenced by global economic conditions. In standard business practices, price negotiations are based on benchmark prices provided by reputable market research institutions such as PLATTS and Independent Commodity Intelligence Services (“ICIS”).*

the price trends for crude oil and naphtha, which is derived from refining crude oil, are nearly identical. Similarly, the prices of key raw materials for producing PPC, such as propylene and ethylene (primarily produced through the naphtha cracking process, known as NCC), also exhibit a comparable trend. Additionally, the price of PPC closely mirrors propylene, the primary raw material. In other words, the price of the product concerned reflects a market trend of the overall global oil price

it is important to note that the price spread—meaning the price difference between inputs and outputs, such as the gap between naphtha and propylene—narrowed significantly in 2022 compared to previous periods, despite the prices following a similar trend. This narrowing of spreads, which indicates reduced profitability for outputs, likely had a substantial impact on the operating performance of PPC producers worldwide.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 80

127. *In conclusion, it is obvious that the Petitioner’s operating performance related with PP products including copolymers had a strong relationship with global economic conditions such as crude oil price, naphtha price during the injury investigation period. The petitioner’s operating results were influenced by global geopolitical dynamics, specifically the outbreak of war between Russia and Ukraine in 2022 that caused rise in production costs as every other producer in the world, which also has been reiterated in the petitioner’s confession in the annual report.*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

However, the Petitioner did not sufficiently analyze this crucial factor in the Petition. Thus, the whole concept that stipulated in the Petition does not reflect any appropriate explanation regarding the alleged injury and causality between import of product concerned and alleged injury. This results deficiencies in the Petition on prima facie evidence on dumping, injury, and causality, as regulated in Article 5.2 and 5.3 of the Agreement

It should be noted that the failure of the petitioners to properly define the product scope, exacerbated by the unjust exclusion of Thailand as presented above have indeed invalidating the analysis of prima facie injury and causality in the petition. This should have led KADI to reject the Petition in the first place or immediately terminate the investigation. This is even clear following our analysis on the fact presented in the Petition.

Jawab:

KADI telah melakukan analisa permohonan yang disampaikan Pemohon yang memuat bukti awal sebagaimana diatur dalam Article 5.3 ADA: *“The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation”* dan Pasal 7 PP 34/2011. Sehingga berdasarkan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan, KADI memutuskan untuk menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan.

128. *Firstly, the Petitioner’s domestic production shows a positive trend from P1 to P3, with increases of 7.9% in domestic production volume and 21.1% in value, respectively. The very slight decrease in the Petitioner’s sales volume in 2022 should be interpreted quite favorably, considering that it faced operational problems due to the slow global economy caused by the outbreak of war between Russia and Ukraine*

Secondly, it is clearly that the loss of operating profit and loss growth showed in the table are not occur because of the imported product concerned. This loss in 2022 was caused by COVID-19 and Rusia and Ukraine war that directly affected the price of global petrochemical market which equally applied to all petrochemical business, including PPC

Thirdly, the stagnation in installed capacity, decrease in production, and reduction in capacity utilization have nothing to do with the imported product concerned. From the table above, it can be seen that the Petitioner has had a substantial amount of end-year stock each year of the proposed injury investigation. This raises a significant question about why the end-year stock remains so large, and it may also indicate poor performance by the Petitioner in 2022

Fourthly, the Petitioner claimed that there was a decrease in manpower as a result of decreased productivity and production. This had also nothing to do

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

with the imported product concerned. According to the Petitioner's 2021(see page 255) and 2022 (see page 266) Annual Report, the increase in employee turnover was due to resignations, contract expirations, retirements, continued studies, or other personal reasons – not imported product concerned. The stable level of manpower in P2 and P3 even indicates that there was no significant employee turnover during those years, suggesting that productivity was relatively stable

Fifth, the Petitioner stated in the Petition that "Return on Investment (RoI), Cash Flow, Ability to Increase Profits and Profit/Loss Growth are company indicators that describe the company's overall condition." In this context, the Petition does not provide any further explanation on this indicator and we believe that the amount of these indicators in the above table have nothing to do with the imported product concerned

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir/produsen di negara yang dituduh yang menyebabkan kerugian bagi IDN sebagaimana disampaikan pada bagian B.4; B.5; dan B.6.

129. *Improper analysis on causal link between import and injury*

the Petitioner misleadingly hide at least three fundamental facts that should have been included in the prima facie injury analysis, namely: (1) the excessive product scope of the product concerned, including the grades that cannot be produced by the Petitioner; (2) Thailand's exclusion in this investigation is biased and subjective due to the fact that one of the Thailand producers is related to the Petitioner; and (3) The Petitioner's operating performance is affected by the global petrochemical market trends

In the absence of those mentioned factors, the claim of the Petitioners becomes unjustified as it intentionally hides the very facts to mislead KADI to initiate this investigation. In the absence of the analysis of the above critical factors, the petition filed by the Petitioners is irrelevant which applies also for prima facie evidence of causal link

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-58; 79-83; bagian B.5.; dan bagian B.6.

130. *Firstly, the volume effect analysis as presented in the Petition*

With respect to the volume effect, the Petitioner claimed in the Petition that imports from alleged countries caused volume effect to domestic industry on absolute and relative term. However, the Petitioner's claim is unsubstantiated for the following reasons

First, the overall claim of the Petitioner on the volume effect in the Petition were baselessly made as they generalized all types of the product concerned which include grades that cannot be produced by the Petitioner that will

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

disallow a fair comparison for determining the volume effect (absolute and relative).

it is obvious the domestic demand for PPC increased consistently over the injury investigation period. The total domestic demand for the PPC had increased 26% from 362 KMT in 2020 to 454 KMT in 2022

However, the Petitioner as the sole PPC producer in Indonesia cannot meet the increasing domestic demand due to their limited production from both production capacity and grades of PPC product. The lack of production ability of the Petitioner to satisfy downstream customer's requirements absolutely have no correlation with the import product concerned

Thus, in term of volume effect, there is undeniable fact that imports of the product concerned did actually not have any impact on the domestic sales volume of the Petitioner but it was rather a self-inflicted factor due to the Petitioner's captive use, and the lack of supply capacity to the domestic market

Moreover, import of the product concerned does not compete with the Petitioner's it as indeed compliments the Petitioner in catering the domestic market demand of the product concerned due to its limited capacity and grades produced.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 58; 80-81; dan bagian B.6.

131. *Secondly, the Petitioner's analysis in the Petition on price effects indicate that there is no price undercutting or price depression during the investigation period. However, the Petitioner argue that there was price suppression since its domestic sales price was 1.5% below its cost of sales in the P3 (2022) which is incorrect and misleading.*

Indeed, import price of PPC from Malaysia was relatively stable including in the POI which was relatively at par with that of Thailand. More importantly, the Petitioner itself established in table at page 10 of the Petition proving conclusively that the import price of PPC from Malaysia was 4,7% higher than the Petitioner's domestic selling price, a difference of which is significantly high. This is stand-alone fact is fundamental and sufficient to prove that import of PPC from Malaysia should be decumulated from the assessment of injury in the investigation and moreover excluded from this investigation.

The fact that import price of PPC from Malaysia did not undercut the Petitioner's domestic selling price significantly means that it gave no whatever impact on the Petitioner's domestic selling price. Any situation encountered by the Petitioner for price depression and suppression, it was overall due to the increase of material cost as we explained above which have nothing to do with import of PPC from Malaysia. Moreover, when the very facts show that indeed

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

that more importantly vast majority of import of PPC from LCTM was not produced by the Petitioner.

Based on the analysis above, it is shown that the any possible injury claimed by the Petitioner would not be attributable to the import of product concerned. The facts presented in the Petition are inconsistent with Articles 3.1 and 3.5 of the Agreement, which require an objective examination in anti-dumping investigations concerning the impact of imports on volume and price. This examination must be based on positive evidence and an objective analysis which the Petitioner failed to comply. This should lead to the termination of the investigation.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa IDN mengalami kerugian yang terlihat dari menurunnya hampir di semua indikator kinerja IDN. Peningkatan bahan baku yang menyebabkan peningkatan harga pokok penjualan seharusnya diiringi dengan peningkatan harga jual PP *Copolymer* IDN. Namun sebaliknya yang terjadi pada tahun 2021-2022 harga jual PP *Copolymer* IDN menurun dan bahkan pada tahun 2022 berada dibawah harga pokok penjualannya. Hal ini dilakukan IDN untuk dapat mempertahankan penjualannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.

Pada tahun 2020-2021 volume impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 18% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 5% pada tahun 2021-2022 sedangkan penjualan IDN mengalami penurunan sebesar 1,1% dimana pada tahun yang sama konsumsi nasional mengalami peningkatan sebesar 2,1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa impor dari negara yang dituduh mendominasi peningkatan konsumsi nasional.

Berdasarkan hasil penyelidikan, LCTM terbukti melakukan dumping dengan besaran lebih dari 2% dan volume impor dari Malaysia diatas 3%. Selain itu, LCTM dan IDN bersaing di pasar yang sama. Dengan adanya kondisi tersebut maka *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* telah terpenuhi untuk otoritas melakukan *assessment* secara kumulatif.

132. *Misrepresented and misleading prima facie dumping evidence in the Petition*

In page 7 of the Petition, the Petitioner stated that it had no access to the domestic price of one of which is Malaysia producer, thus the Petitioner construct the normal value for Malaysia based on the Petitioner's own cost structure by using the price of naphtha raw material from each country then converted it to propylene. In addition, the Petitioner add cost that used to produce propylene into propylene copolymer plus profit. In this regard, the information related to raw material prices are obtained from international journals and conversion value and profit use the Petitioner's data.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

The above calculation that results in the alleged dumping margin of Malaysia for 7.1% contains several methodological flaws as; (i) the construction of normal value using the cost structure of the Petitioner is not justified, (ii) the use of the Petitioner's profit is completely baseless, and (iii) there was no meaningful non confidential summary of data for the calculation of dumping margin in the Petition as required by the Article 6.5.1

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 115 dan 121

Permohonan yang bersifat tidak rahasia yang disampaikan pemohon telah sesuai dengan *Article 6.5.1 Anti Dumping Agreement*. Permohonan tersebut telah cukup detail untuk dapat dipahami oleh pihak berkepentingan.

133. *First, it is highly unreasonable to compare the cost structure of the Petitioner to the subject countries. We believe there are big gap between the cost structure of each producer in this investigation and the Petitioner. This includes direct material cost, direct labor, energy cost, overhead and even selling, general, and administrative (SGA). The net profit of the Petitioner that formed the constructed normal value is also highly questionable. As such, the constructed normal value the Petitioner tried to establish is totally flawed and misleading.*

Worse is that such flawed constructed normal value was then compared to the export price of Malaysia to Indonesia based on processed BPS's import statistic which the Petitioner deducted some cost to arrive at ex-factory export price for the Malaysia producers. The Petitioner had also wrongly deducted the inland freight and handling of export price of LCTM from Malaysia which is unfair and completely wrong ad such costs were not incurred on CIF price.

The fundamental flawed here is that the Petitioner had used two types of data from completely different sources (normal values is of the Petitioner's own data while export prices are from Malaysian producer respectively). It is completely unfair comparison where the Petitioner compared "apple to orange" and that it is unjust to compare two sets of different data from different sources

Jawab:

Dalam melakukan konstruksi nilai normal untuk semua negara yang dituduh dengan menggunakan struktur biaya IDN telah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara. Sebagai contoh dalam menentukan harga bahan baku yang digunakan mengikuti harga bahan baku di masing-masing negara yang dituduh yang bersumber dari jurnal *publish*. Dengan demikian, perbandingan nilai normal dan harga ekspor telah dilakukan secara *fair*.

134. *In paragraph 8.37 of the same report, the panel stresses that adjustment to price comparability between normal value and export price recognized in Article 2.4 of the Agreement must also be considered*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Furthermore, the manner of which used by the Petitioner to present those figures is unacceptable and does not allow a reasonable understanding of the submitted confidential information which constitute a clear violation of Article 6.5.1 of the Agreement

The unacceptable presentation of the dumping margin calculation added with the lack of explanation from the Petitioner found in the Petition reflects KADI's failure to fulfill its duty as mandated by Articles 5.2, Article 5.3 and Article 6.5.1 of the Agreement.

In light of the facts and legal requirements, KADI should have rejected the misleading methodology at the first place or terminating the currently ongoing proceeding as it was not initiated based on relevant and accurate prima facie evidence on dumping

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 131 dan 132

135. Inadequate analysis on non-attribution factors in the Petition

We do not see any proper analysis to the possible other factors which may have caused injury to the domestic industry was presented in the Petition

in its presentation of prima facie injury, the Petitioner misleadingly hide at least three fundamental facts, namely: (1) the excessive product scope of the product concerned, including the grades that cannot be produced by the Petitioner; (2) Thailand's exclusion in this investigation is biased and subjective due to the fact that one of the Thailand producers is related to the Petitioner; and (3) The Petitioner's operating performance that is affected by the global petrochemical market trends

With respect to the product scope, the Petitioner provide inadequate analysis in the Petition about its capability and technology to produce certain grades of PPC since the technology used by the Petitioner will impact on company performance. We found that the ability of the Petitioner in producing Copolymer was unable to meet domestic needs and there are certain PPC the Petitioner does not produce

As mentioned in previous section, the Petitioner failed to examine the effect of volume import of PPC and unilaterally and without bases stated that the imported product concerned cause absolute and relative volume effect. In fact, the Petitioner as a sole PPC producer in Indonesia cannot meet the increasing domestic demand due to their limited production from both production capacity and grades of PPC product

Furthermore, the Petitioner did not include a brief analysis of the global petrochemical market situation during the investigation period, including factors such as COVID-19 and the Russia-Ukraine war. These factors clearly demonstrate that the unfavorable changes and potential losses claimed by the

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Petitioner are also affecting the petrochemical industry worldwide. This has nothing to do with the imported product concerned

The examination of non-attribution factors under Article 3.5 of the Agreement is mandatory and such examination of the non-attribution factor must be made separately with those factors related to import

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-58; 79-83; dan bagian C

136. *Any imposition of anti-dumping duty on import of PPC would be against Indonesia's national interest*

Any imposition of anti-dumping duty would only serve to harm Indonesian downstream users of the product concerned. As mentioned in section II of this legal brief, there are certain PPC that the Petitioner cannot produce

If anti-dumping duty is to be imposed, it would have adverse impact on national interest in Indonesia. This is due to the fact, as explained above, vast majority of PPC imported by LCTM to Indonesia, used by various down-stream industry such as foods and beverages, medicine and automotive in Indonesia, cannot be produced by the Petitioner

Jawab:

Sesuai dengan Pasal 25 PP No. 34 Tahun 2011, pertimbangan kepentingan nasional akan menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Perdagangan sebelum memutuskan pengenaan BMAD.

137. *More concretely, the imposition of anti-dumping duty on import of PPC from LCTM would restrict the multi-sources primary material principle for such Indonesian industry which would at the same time create significant bottle-neck for sustainability supply of their materials. These would then overall adversely impact on their competitiveness in international market and moreover deeply hurt Indonesian society as end customer of PPC product painfully*

Moreover, as the Petitioner is the sole producer in Indonesia which means that any imposition of anti-dumping duty on PPC would lead the Petitioner to dominate the market by inflating its price. Worse when it cannot cater demand of the market by means of numerous grades and volume capacity which case cause the scarcity of supply of PPC in Indonesia which is another bad news for Indonesia downstream industry and at the same time Indonesian society.

Given the above facts, KADI should not recommend any-imposition of anti-dumping duty on import of PPC from LCTM but to terminate this investigation

Jawab:

Sesuai Pasal 94 PP No. 34 Tahun 2011 KADI bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Berdasarkan penyelidikan KADI membuktikan bahwa telah terjadi Dumping yang mengakibatkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri. Pengenaan BMAD bertujuan untuk menyamakan tingkat perdagangan yang wajar sehingga produksi dalam negeri mampu bersaing secara sehat dengan barang impor yang terbukti melakukan praktik dumping. Kebutuhan industri hilir dapat diperoleh dari sumber impor lain atau dengan membayar BMAD, karena pengenaan BMAD tidak menutup impor.

138. *We would like to also request that KADI apply lesser duty principle under Article 9.1 of the Agreement*

We believe that the application of lesser duty principle will also lead to the termination of the investigation on LCTM as its overall import price will be higher than that of the Petitioner's price

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 137 di atas, bahwa sesuai dengan Pasal 94 PP No. 34 Tahun 2011, KADI bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Berdasarkan penyelidikan KADI membuktikan bahwa telah terjadi Dumping yang mengakibatkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri. Sedangkan pengenaan BMAD merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Perdagangan termasuk memutuskan besaran BMAD maupun jangka waktu pengenaannya, bilamana ada pengenaan BMAD.

139. *In view of the foregoing, it is irrefutable that there is indeed improper product definition in the Petition and the exclusion of Thailand from the investigation is unjust. These have led to misrepresentations prima facie evidence of dumping, injury, and causality contained in the Petition. As such, LCTM respectfully requests KADI reject the Petition filed by the Petitioner or immediately terminate the current investigation without imposing any duties*

Jawab:

Sebagaimana telah dijelaskan pada resital 124 di atas bahwa permohonan harus ditolak dan penyelidikan segera dihentikan bila temuan margin dumping adalah *de minimis* atau volume impor negara yang dituduh dumping adalah *negligible*.

Sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam Permohonannya bahwa margin dumping atas negara-negara yang dituduh adalah 3,4%-43,7% dan volume impor negara yang dituduh tidak *negligible* dengan volume sebesar 3%-43% dari total impor. Sedangkan penyelidikan KADI membuktikan bahwa terjadi praktik dumping dengan besaran margin dumping sebesar 10,57%-82,83% sebagaimana dijelaskan pada Bagian B.4 di atas.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

D.7. The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

140. *More concretely, as we will further elaborate below, the main reasons for KADI to reject the petition on its face or immediately terminate the present investigation among others due to the following fundamental facts:*

The Petitioner failed to properly define the product scope, causing fundamental flawed presentation of facts and analysis in the Petition which prevents objective examination of positive in this investigation;

Exclusion of significant volume of import from Thailand even further jeopardies the credibility of the petition and it leads to selective and discriminative investigation;

There is no sufficient prima facie evidence of dumping, injury and causality as required in Article 5.2 and 5.3 of the Agreement;

No adequate non-attribution analysis in the Petition;

The imposition of anti-dumping duty would harm Indonesia's national interests.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital-resital di atas, bahwa Permohonan yang disampaikan CAP telah memenuhi persyaratan dalam PP No. 34 Tahun 2011 maupun Anti Dumping Agreement. Sedangkan mengenai pertimbangan kepentingan nasional sesuai Pasal 25 PP No. 34 Tahun 2011, merupakan kewenangan dari Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Perdagangan.

141. *The Petitioner Failed to Properly Define the Product Scope in the Petition*

On pages 3 and 4 of the Petition, the Petitioner simply defined the product scope of the like product and product scope of investigation as Polypropylene Copolymer (PPC) under HS Code Number: 39023090 (Copolymer propylene in the form of liquid and pasta), having physical characteristics: white pellet solid, odorless, tasteless with a melting point of 160 – 170 °C and a density of 0.89 – 0.91 g/cm³ for impact copolymer (block) type ; melting point 130 – 157 °C and density 0.89 – 0.91 g/cm³ for the random copolymer type.

The two references we provided above clearly suggest that, despite the Petitioner's efforts to cover an overly broad range of products concerned in this investigation, its capability in the production and sales of the product concerned remains limited

It is clear from the definition of the product scope under investigation that the Petitioner's proposal in its Petition is too generic and overly broad. There is no factual support to demonstrate that the Petitioner has the capability to produce the full range of the product concerned

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

We have attested to and thoroughly explained the significant differences between the TPC product and the Petitioner, and have therefore requested exclusion for our product from KADI

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

142. *The two references as provided above suggests clearly that despite the efforts of the Petitioner to cover the overly broad subject merchandise in this investigation, it does have limited capability (also capacity) in the production and sales of the product concerned.*

It is clear from the definition of the product concerned, that the Petitioner offered a very generic and overly broad product scope for which it cannot be supported factually that it has indeed the capability to produce the full range of the product concerned.

On the contrary, the table in the KADI standard questionnaire of KADI we cited above proved strongly that there was a wide range of the subject merchandise that cannot be produced by the Petitioner as explained below.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

143. *The table of the PCN formulation as cited above defined the characteristics/properties of the following:*

- I. *Density (g/cm³): 0,89 – 0,91*
- II. *Melting Point (°C): 130 – 157, and 160 – 170*
- III. *Melt Flow Rate (g/10min): 4,5 – 5,5; 8,0 – 12,0; 15,2 – 22,8; 36,0 – 40,0; dan 45,0 – 55,0*

KADI limited the density of the subject merchandise from 0,89-0,91. KADI furthermore defined the melting points as 130-157 and 160-170 whilst it determined the melt flow rate is 4.5-5.5; 8.0-12.0, 15.2-22.8, 36.0-40.0, and 45.0-55.0.

The above parameters of melting points, melt flow rates show a gap reflecting that the Petitioner was not able to produce which realistically include (1) those of melting points level of above 157 but less than 160 (2) melt flow of higher than 5.5 but less than 8(3) higher than 12 but less than 15.2 (4) higher than 22.8 but less than 36.0 and (5) higher than 40.0 but less than 45.0.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

144. *Pursuant to the like product as defined under Article 2.6 of the Agreement and Article 1.10 of GR Number 34/2011 supported by the findings in Japan – Alcoholic Beverage, KADI should exclude the grades of subject merchandise in the listed figure above and those grades/types which are not captured on within the range of characteristic presented in the table of the Section of the KADI questionnaire*

Consistence with the definition of the like product based on the WTO Jurisprudence as cited above, absence of parameters either in density, melting flow rate, or melting point means those products cannot constitute likeness as required by Article 2.6 of the Agreement and Article 1.10 GR 34/2011. This is so since the absence of such parameters at the Petitioner's end significantly means that those ranges of products will have complete differences in (1) application/end use (2) manufacturing process (3) price (4) perception of customers. The overall signifies that the produced PPC by the Petitioner differs from the TPC's export of its products to Indonesia which cannot be substituted with the subject merchandise which the Petitioner can produce.

This more specifically signifies that the product concerned produced by the Petitioner has a different manufacturing process, price, and application as compared to grades in the third and second figures which TPC exported to Indonesia. Furthermore, in the absence of such properties, grades TPC exported to Indonesia under figures 3 and 4 above cannot be substituted with the product concerned produced by the Petitioner, and finally the customers will have their own perception as to why they require grades of the product concerned they purchased from TPC which they cannot source of the Petitioner.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

145. *The above understanding is based on the following facts:*

First, melting point refers to the transition temperature at which a solid substance changes to a liquid when heat is applied. Polymer grades with high melting points are engineered to offer enhanced stiffness and dimensional stability for demanding film applications, while those with low melting points are optimized to ensure effective heat-sealing at reduced temperatures, thereby facilitating efficient processing and adhesion in applications requiring lower heat inputs.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Second, melt flow rate is indeed a measure of how easily a thermoplastic material can flow (flowability) under a specified pressure and temperature and is widely used in the plastics industry to assess the processability and quality of different materials. Polymer grades with a high melt flow rate are optimally engineered for applications such as flexible packaging, where efficient processing is paramount. Conversely, polymer grades with a low melt flow rate offer superior mechanical strength, stiffness, and impact resistance, making them ideal for high-strength packaging and industrial film applications.

It is critical to note that both levels of melting point and melt flow rate are determined based on the requirement of the TPC's customers to suit the need in terms of production process and application. It is our understanding that the choice of customers to procure such grades from TPC was solely due to the inability of the Petitioner to produce these grades.

Given that there is no competition between TPC's imported product and the Petitioner's product, KADI should also have excluded TPC from the cumulative injury assessment and instead assessed the effect of TPC's imported product independently

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

146. *Moreover, in light of the above, the Petition does not represent proper and appropriate data and analysis due to (i) the HS Code and product scope being excessively broad, including the grades that cannot be produced by the Petitioner and (ii) the majority of imports from TPC do not represent the products or grades of PPC that Petitioner can produce.*

It should also be noted that the Agreement provides clear and strict requirements to initiate an investigation in which the authorities is required to examine the accuracy and the adequacy of evidences presented in the petition prior to initiate the investigation.

Article 5.2 of the Agreement clearly underlines the standard and basic requirements for the initiation of investigation and prohibits the mere use of simple assertions that cannot be substantiated by the relevant evidence. Meanwhile, Article 5.3 of the Agreement furthermore stresses the authorities' obligations to examine the accuracy and adequacy of data and evidence presented to them in the application, instead of just merely accepting what was submitted by the Petitioner in the Petition, prior in deciding to initiate the investigation.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 58-59 di atas, bahwa dalam penyelidikan ini KADI mempertimbangkan adanya pengecualian terhadap barang yang diselidiki.

147. *In assessing the adequacy of the application, KADI should not have only exclusively relied on the information submitted by the Petitioner. It should also include an examination of facts known to KADI and facts readily at KADI's disposal, such as information which were publicly available such as the Petitioner's annual reports. An investigation should therefore only be initiated after a thorough examination conducted by the authorities on the sufficiency of the prima facie evidence presented to them*

The Petitioner's failure to properly defined the product scope, caused fundamental flawed presentation of facts and analysis in the Petition. This failure also has led to misleading prima facie evidence for injury and causality in the Petition. Thus, it is evident that the Petitioner failed to comply with Article 5.2 and 5.3 of the Agreement. Given these critical facts, KADI should terminate this investigation

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 115 Permohonan yang disampaikan CAP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PP 34 Tahun 2011 maupun *Article 5.2* ADA. Dimana terdapat bukti awal yang cukup mengenai adanya Barang Dumping, Kerugian dan hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan terkait dengan adanya Perusahaan afiliasi di Thailand, sebagaimana telah dijelaskan pada resital 57, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011, tidak serta merta membatalkan hak CAP untuk menjadi IDN dalam hal Tindakan Antidumping karena Perusahaan tersebut tidak melakukan impor/tasasi Barang Dumping.

148. *The Petition Discriminatively Excluded Import of The Product Concerned from Thailand*

The Petitioner has discriminatively excludes Thailand from the Petition despite the fact that Thailand has the third largest export of product concerned to Indonesia during the POI on top of having the third largest export of product concerned, Thailand's import share also reached 13% in the POI, even higher than several of the alleged countries namely Malaysia, Vietnam, and PEA

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-57; 79-83; dan bagian B.6.

149. *Furthermore, in terms of pricing, there was no any significant differences in the export price between Thailand and Singapore, including during the POI*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Based on the above facts that (i) import share of Thailand was significantly above 3%; (ii) similar level of pricing between import from Thailand and at least Singapore (iii) Thailand's import price dropped in the POI. As such, it is unjustified to exclude import of the product concerned from Thailand from this investigation

If the reason of the exclusion was focused on the import price of Thailand then this should also apply for Singapore and Malaysia as based on table in page 10 of the Petition it was established that the import price of PPC from both Singapore and Malaysia was significantly much higher than that of the Petitioner's therefore did not under the domestic selling price of the Petitioner

We believe however that Thailand's exclusion in this investigation was deliberately designed to fulfil legal standing requirement under Article 1.17 of GR 34/2011 whereby it strictly exclude Indonesian producer having relationship with producer/exporter in the alleged country from the definition of domestic industry. In fact, the known Thailand producer namely, SCG Chemicals Public Company Limited, is one of the major shareholders of the Petitioner

Therefore, the exclusion of Thailand from the investigation is solely a bad faith trick of the Petitioner to avoid legal standing problem as required in Article 1.17 of GR 34/2011 which is indeed unjustified by the fact we presented above. As a consequence, the Petition filed by the Petitioner is biased, subjective, cherry-picking and clearly violates 5.2 of the Agreement, read together with the Article 3.1 Agreement which mandates that the determination of injury shall be based on positive evidence and involve an objective examination

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-57; 79-83; dan bagian B.5.

150. *Insufficient prima facie evidence on injury*

Overall, as we presented above, the injury and causality analysis of the Petitioner in the Petition is no longer valid, and it should have been rejected by KADI due to its failure to properly define the product scope and unjust exclusion of significant import of the product concerned from Thailand.

Furthermore, Singapore especially TPC is to be decumulated for the purpose of injury and causality analysis in this in this investigation due to the facts (1) its product imported into Indonesia do not compete with the Petitioner's and (2) its import price was significantly much higher than that of the Petitioner's domestic selling price. Moreover, our analysis below reinforces the fact that the entire performance of the Petitioner was significantly impacted by the global situation which would not be attributable to import of PPC from Singapore, especially TPC

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 124

Berdasarkan hasil penyelidikan, TPC terbukti melakukan dumping dengan besaran lebih dari 2% dan volume impor dari Singapura diatas 3%. Selain itu, TPC dan IDN bersaing di pasar yang sama. Dengan adanya kondisi tersebut maka *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* telah terpenuhi untuk otoritas melakukan *assessment* secara kumulatif.

151. *The price trends for crude oil and naphtha, which is derived from refining crude oil, are nearly identical. Similarly, the prices of key raw materials for producing PPC, such as propylene and ethylene (primarily produced through the naphtha cracking process, known as NCC), also exhibit a comparable trend. Additionally, the price of PPC closely mirrors propylene, the primary raw material. In other words, the price of the product concerned reflects a market trend of the overall global oil price*

it is important to note that the price spread—meaning the price difference between inputs and outputs, such as the gap between naphtha and propylene—narrowed significantly in 2022 compared to previous periods, despite the prices following a similar trend. This narrowing of spreads, which indicates reduced profitability for outputs, likely had a substantial impact on the operating performance of PPC producers worldwide.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 81

152. *In conclusion, it is obvious that the Petitioner’s operating performance related with PP products including copolymers had a strong relationship with global economic conditions such as crude oil price, naphtha price during the injury investigation period. The petitioner’s operating results were influenced by global geopolitical dynamics, specifically the outbreak of war between Russia and Ukraine in 2022 that caused rise in production costs as every other producer in the world, which also has been reiterated in the petitioner’s confession in the annual report.*

However, the Petitioner did not sufficiently analyze this crucial factor in the Petition. Thus, the whole concept that stipulated in the Petition does not reflect any appropriate explanation regarding the alleged injury and causality between import of product concerned and alleged injury. This results deficiencies in the Petition on prima facie evidence on dumping, injury, and causality, as regulated in Article 5.2 and 5.3 of the Agreement.

It should be noted that the failure of the petitioners to properly define the product scope, exacerbated by the unjust exclusion of Thailand as presented above have indeed invalidating the analysis of prima facie injury and causality in the petition. This should have led KADI to reject the Petition in the first place

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

or immediately terminate the investigation. This is even clear following our analysis on the fact presented in the Petition.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 80 dan 81

153. *In page 9 of the Petition, the Petitioner stated that there are several indicators that decreased, mainly in P2 (2021) and P3 (2022), such as: domestic sales, operating profit, installed capacity, production, capacity utilization, manpower, return on investment, cash flow, and its ability to increase capital. However, this would not be incorrect as we explained below.*

Firstly, from the table above, we can see that the Petitioner's domestic production shows a positive trend from P1 to P3, with increases of 7.9% in domestic production volume and 21.1% in value, respectively. The very slight decrease in Chandra's sales volume in 2022 should be interpreted quite favorably, considering that it faced operational problems due to the slow global economy caused by the outbreak of war between Russia and Ukraine.

Secondly, it is clearly that the loss of operating profit and loss growth showed in the table are not occur because of the imported product concerned. This loss in 2022 was caused by COVID-19 and Rusia and Ukraine war that directly affected the price of global petrochemical market which equally applied to all petrochemical business, including PPC. The Petitioner even stated in page 50 in its' 2022 Annual Report

Thirdly, the stagnation in installed capacity, decrease in production, and reduction in capacity utilization have nothing to do with the imported product concerned. From the table above, it can be seen that the Petitioner has had a substantial amount of end-year stock each year of the proposed injury investigation. This raises a significant question about why the end-year stock remains so large, and it may also indicate poor performance by the Petitioner in 2022.

Fourthly, the Petitioner claimed that there was a decrease in manpower as a result of decreased productivity and production. This had also nothing to do with the imported product concerned. According to the Petitioner's 2021 (page 255) and 2022 (page 266) Annual Report, the increase in employee turnover was due to resignations, contract expirations, retirements, continued studies, or other personal reasons – not imported product concerned. The stable level of manpower in P2 and P3 even indicates that there was no significant employee turnover during those years, suggesting that productivity was relatively stable

Fifth, the Petitioner stated in the Petition that "Return on Investment (RoI), Cash Flow, Ability to Increase Profits and Profit/Loss Growth are company indicators that describe the company's overall condition." In this context, the Petition does not provide any further explanation on this indicator, and we

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

believe that the amount of these indicators in the above table have nothing to do with the imported product concerned

the Petitioner failed to follow the criteria and requirement to examine injury factors listed in Article 3.4 of the Agreement. Therefore, in the absence of prima facie evidence of injury and adequate explanation in the Petition as regulated in Article 5.2 Agreement, KADI should have rejected the Petition in the first place or immediately terminate the investigation

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 80 dan 127

154. *Improper analysis on causal link between import and injury*

Article 3.2 and 3.5 of the Agreement requires the analysis of causal link between dumped imports and injury claimed to be suffered by the Petitioner

As noted above, the Petitioner misleadingly hide at least three fundamental facts that should have been included in the prima facie injury analysis, namely: (1) the excessive product scope of the product concerned, including the grades that cannot be produced by the Petitioner; (2) Thailand's exclusion in this investigation is biased and subjective due to the fact that one of the Thailand producers is related to the Petitioner; and (3) The Petitioner's operating performance is affected by the global petrochemical market trends

In the absence of those mentioned factors, the claim of the Petitioners becomes unjustified as it intentionally hides the very facts to mislead KADI to initiate this investigation. In the absence of the analysis of the above critical factors, the petition filed by the Petitioners is irrelevant which applies also for prima facie evidence of causal link

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-58; 79-83; bagian B.5.; dan bagian B.6.

155. *With respect to the volume effect, the Petitioner claimed in the Petition that imports from alleged countries caused volume effect to domestic industry on absolute and relative term. However, the Petitioner's claim is unsubstantiated for the following reasons.*

First the overall claim of the Petitioner on the volume effect in the Petition were baselessly made as they generalized all types of the product concerned which include grades that cannot be produced by the Petitioner that will disallowed a fair comparison for determining the volume effect (absolute and relative).

it is obvious the domestic demand for PPC increased consistently over the injury investigation period. The total domestic demand for the PPC had increased 26% from 362 KMT in 2020 to 454 KMT in 2022

However, the Petitioner as the sole PPC producer in Indonesia cannot meet the increasing domestic demand due to their limited production from both

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYPROPYLENE COPOLYMER YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

production capacity and grades of PPC product. The lack of production ability of the Petitioner to satisfy downstream customer's requirements absolutely have no correlation with the import product concerned.

Thus, in term of volume effect, there is undeniable fact that imports of the product concerned did actually not have any impact on the domestic sales volume of the Petitioner but it was rather a self-inflicted factor due to the Petitioner's captive use, and the lack of supply capacity to the domestic market

Moreover, import of the product concerned does not compete with the Petitioner's it as indeed compliments the Petitioner in catering the domestic market demand of the product concerned due to its limited capacity and grades produced.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 58; 80-81; dan bagian B.6.

156. *Secondly, the Petitioner's analysis in the Petition on price effects indicate that there is no price undercutting or price depression during the investigation period. However, the Petitioner argue that there was price suppression since its domestic sales price was 1.5% below its cost of sales in the P3 (2022) which is incorrect and misleading.*

Indeed, import price of PPC from Singapore was relatively stable including in the POI which was relatively at par with that of Thailand. More importantly, the Petitioner itself established in table at page 10 of the Petition proving conclusively that the import price of PPC from Singapore was 12,4% higher than the Petitioner's domestic selling price, a difference of which is significantly high. This is stand-alone fact is fundamental and sufficient to prove that import of PPC from Singapore should be decumulated from the assessment of injury in the investigation and moreover excluded from this investigation.

The fact that import price of PPC from Singapore did not undercut the Petitioner's domestic selling price significantly means that it gave no whatever impact on the Petitioner's domestic selling price. Any situation encountered by the Petitioner for price depression and suppression, it was overall due to te increase of material cost as we explained above which have nothing to do with import of PPC from Singapore. Moreover, when the very facts show that indeed that more importantly vast majority of import of PPC from TPC was not produced by the Petitioner.

Based on the analysis above, it is shown that the any possible injury claimed by the Petitioner would not be attributable to the import of product concerned. The facts presented in the Petition are inconsistent with Articles 3.1 and 3.5 of the Agreement, which require an objective examination in anti-dumping investigations concerning the impact of imports on volume and price. This examination must be based on positive evidence and an objective analysis

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

which the Petitioner failed to comply. This should lead to the termination of the investigation.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa IDN mengalami kerugian yang terlihat dari menurunnya hampir di semua indikator kinerja IDN. Peningkatan bahan baku yang menyebabkan peningkatan harga pokok penjualan seharusnya diiringi dengan peningkatan harga jual PP *Copolymer* IDN. Namun sebaliknya yang terjadi pada tahun 2021-2022 harga jual PP *Copolymer* IDN menurun dan bahkan pada tahun 2022 berada dibawah harga pokok penjualannya. Hal ini dilakukan IDN untuk dapat mempertahankan penjualannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.

Pada tahun 2020-2021 volume impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 18% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 5% pada tahun 2021-2022 sedangkan penjualan IDN mengalami penurunan sebesar 1,1% dimana pada tahun yang sama konsumsi nasional mengalami peningkatan sebesar 2,1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa impor dari negara yang dituduh mendominasi peningkatan konsumsi nasional.

157. *Misrepresented and misleading prima facie dumping evidence in the Petition*

In page 7 of the Petition, the Petitioner stated that it had no access to the domestic price of one of which is Singapore producer, thus the Petitioner construct the normal value for Singapore based on the Petitioner's own cost structure by using the price of naphtha raw material from each country then converted it to propylene. In addition, the Petitioner add cost that used to produce propylene into propylene copolymer plus profit. In this regard, the information related to raw material prices are obtained from international journals and conversion value and profit use the Petitioner's data.

The above calculation that results in the alleged dumping margin of Singapore for 7.5% contains several methodological flaws as; (i) the construction of normal value using the cost structure of the Petitioner is not justified, (ii) the use of the Petitioner's profit is completely baseless, and (iii) there was no meaningful non confidential summary of data for the calculation of dumping margin in the Petition as required by the Article 6.5.1.

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 132

158. *First, it is highly unreasonable to compare the cost structure of the Petitioner to the subject countries. We believe there are big gap between the cost structure of each producer in this investigation and the Petitioner. This includes direct material cost, direct labor, energy cost, overhead and even selling, general, and administrative (SGA). The net profit of the Petitioner that formed*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

the constructed normal value is also highly questionable. As such, the constructed normal value the Petitioner tried to establish is totally flawed and misleading.

Worse is that such flawed constructed normal value was then compared to the export price of Singapore to Indonesia based on processed BPS's import statistic which the Petitioner deducted some cost to arrive at ex-factory export price for the Singapore producers. The Petitioner had also wrongly deducted the inland freight and handling of export price of TPC from Singapore which is unfair and completely wrong as such costs were not incurred on CIF price.

The fundamental flawed here is that the Petitioner had used two types of data from completely different sources (normal values is of the Petitioner's own data while export prices are from Singapore producer respectively). It is completely unfair comparison where the Petitioner compared "apple to orange" and that it is unjust to compare two sets of different data from different sources

Jawab:

Dalam melakukan konstruksi nilai normal untuk semua negara yang dituduh dengan menggunakan struktur biaya IDN telah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara. Sebagai contoh dalam menentukan harga bahan baku yang digunakan mengikuti harga bahan baku di masing-masing negara yang dituduh yang bersumber dari jurnal *publish*. Dengan demikian, perbandingan nilai normal dan harga ekspor telah dilakukan secara *fair*.

159. *As noted above, in its interpretation to Article 5.2 of Agreement in relation to the determination of prima facie dumping evidence, on Guatemala-Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico, the panel understands that anti-dumping investigation is a process but it at the same time determines*

In paragraph 8.37 of the same report, the panel stresses that adjustment to price comparability between normal value and export price recognized in Article 2.4 of the Agreement must also be considered

Furthermore, the manner of which used by the Petitioner to present those figures is unacceptable and does not allow a reasonable understanding of the submitted confidential information which constitute a clear violation of Article 6.5.1 of the Agreement

The unacceptable presentation of the dumping margin calculation added with the lack of explanation from the Petitioner found in the Petition reflects KADI's failure to fulfill its duty as mandated by Articles 5.2, Article 5.3, and 6.5.1 of the Agreement.

In light of the facts and legal requirements, KADI should have rejected the misleading methodology at the first place or terminating the currently ongoing

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

proceeding as it was not initiated based on relevant and accurate prima facie evidence on dumping

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 132 dan 133

160. *Inadequate analysis on non-attribution factors in the Petition*

We do not see any proper analysis to the possible other factors which may have caused injury to the domestic industry was presented in the Petition.

As already mentioned above, in its presentation of prima facie injury, the Petitioner misleadingly hide at least three fundamental facts, namely: (1) the excessive product scope of the product concerned, including the grades that cannot be produced by the Petitioner; (2) Thailand's exclusion in this investigation is biased and subjective due to the fact that one of the Thailand producers is related to the Petitioner; and (3) The Petitioner's operating performance that is affected by the global petrochemical market trends.

With respect to the product scope, the Petitioner provide inadequate analysis in the Petition about its capability and technology to produce certain grades of PPC since the technology used by the Petitioner will impact on company performance. We found that the ability of the Petitioner in producing Copolymer was unable to meet domestic needs and there are certain PPC the Petitioner does not produce.

As mentioned in previous section, the Petitioner failed to examine the effect of volume import of PPC and unilaterally and without bases stated that the imported product concerned cause absolute and relative volume effect. In fact, the Petitioner as a sole PPC producer in Indonesia cannot meet the increasing domestic demand due to their limited production from both production capacity and grades of PPC product

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 56-58; 79-83; dan bagian C

161. *Furthermore, the Petitioner did not include a brief analysis of the global petrochemical market situation during the investigation period, including factors such as COVID-19 and the Russia-Ukraine war. These factors clearly demonstrate that the unfavorable changes and potential losses claimed by the Petitioner are also affecting the petrochemical industry worldwide. This has nothing to do with the imported product concerned.*

The examination of non-attribution factors under Article 3.5 of the Agreement is mandatory and such examination of the non-attribution factor must be made separately with those factors related to import

we do not find any such analysis in the Petition of the Petitioner which should have led KADI to reject the complaint of the Petitioner in the first place

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Jawab:

Merujuk pada jawaban resital 81

162. *Any imposition of anti-dumping duty on import of PPC would be against Indonesia's national interest*

Any imposition of anti-dumping duty would only serve to harm Indonesian downstream users of the product concerned. As mentioned in section II of this legal brief, there are certain PPC that the Petitioner cannot produce.

If anti-dumping duty is to be imposed, it would have adverse impact on national interest in Indonesia. This is due to the fact, as explained above, vast majority of PPVC exported by TPC to Indonesia, used by various down-stream industry using flexible packaging for foods and beverages, medical devices and automotive in Indonesia, cannot be produced by the Petitioner.

More concretely, the imposition of anti-dumping duty on import of PPC from TPC would restrict the multi-sources of primary material principle for such Indonesian industry which would at the same time create significant bottleneck for supply sustainability of their materials. These would then overall adversely impact on their competitiveness in international market and moreover deeply hurt Indonesian society as end customer of PPC product painfully.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 89, bahwa kewenangan mengenai pertimbangan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP No. 34 Tahun 2011 merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Perdagangan. Sedangkan sesuai Pasal 94 PP No. 34 Tahun 2011, KADI bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.

163. *Moreover, as the Petitioner is the sole producer in Indonesia which means that any imposition of anti-dumping duty on PPC would lead the Petitioner to dominate the market by inflating its price. Worse when it cannot cater demand of the market by means of numerous grades and volume capacity which case cause the scarcity of supply of PPC in Indonesia which is another bad news for Indonesia downstream industry and at the same time Indonesian society.*

Given the above facts, KADI should not recommend any-imposition of anti-dumping duty on import of PPC from TPC but to terminate this investigation.

Jawab:

Keberadaan CAP selaku produsen tunggal tidak menghalangi haknya untuk mengajukan perlindungan saat terjadi Tindakan *unfair trade (dumping)*. Namun demikian, sesuai Pasal 25 PP No. 34 Tahun 2011, Pemerintah.c.q. Menteri Perdagangan akan melakukan kajian atas pertimbangan kepentingan nasional setelah KADI menyelesaikan penyelidikannya.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

164. *We would like to also request that KADI apply lesser duty principle under Article 9.1 of the Agreement*

We believe that the application of the lesser duty principle will also lead to the termination of the investigation on TPC as its overall import price will be higher than that of the Petitioner's price

Jawab:

Penerapan prinsip *lesser duty* akan menjadi bagian pertimbangan dalam pengambilan Keputusan setelah KADI menentukan besaran margin dumping yang ditemukan. Sesuai dengan Pasal 25 PP 34 tahun 2011, Pemerintah c.q. Menteri Perdagangan dalam hal menerima rekomendasi KADI, dapat mengubah besaran maupun jangka waktu yang akan diberlakukan untuk pengenaan BMAD.

165. *In view of the foregoing, it is irrefutable that there is indeed an improper product definition in the Petition and the exclusion of Thailand from the investigation is unjust. These have led to misrepresentation of prima facie evidence of dumping, injury, and causality contained in the Petition. As such, TPC respectfully requests KADI reject the Petition filed by the Petitioner or immediately terminate the current investigation without imposing any duties*

Jawab:

Permohonan yang disampaikan CAP telah memenuhi persyaratan bukti awal yang diatur dalam *Article 5.2 ADA* dan KADI telah memeriksa bukti awal untuk dimulainya penyelidikan. Sedangkan pengenaan BMAD, sesuai PP No. 34 Tahun 2011, KADI harus membuktikan bahwa telah terjadi dumping yang mengakibatkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri sebagaimana tertuang pada Bagian B.4., Bagian B.5., dan Bagian B.6. di atas.

166. *It is understood that based on its separate discussion with Petitioner, Rotokemas proposed to exclude the (i) Random Copolymer Extrusion Coating/ Lamination, and (ii) CPP Terpolymer, with the following respective parameters:*

1) *Random Copolymer Extrusion Coating/ Lamination*

- *Contains 2 co monomers C3 - C2 or C3 - C4 → Check by FTIR*
- *MFR range 20 - 28 → Check by MFR*
- *Density 0,9 - 0,91 g/cm³ → Density Meter*
- *Visual colour transparent → Visual Sample Transparent*

2) *CPP Terpolymer*

- *Contains 3 co monomers C2 - C3 - C4 → Check by FTIR*
- *MFR range 5,5 and 7 → Check by MFR Tester*
- *Density 0,9 - 0,91 g/cm³ → Density Meter*
- *Visual colour transparent → Visual Sample Transparent*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

Comments on exclusion parameters proposed by Rotokemas

a. Korean Producers

The proposed parameters for both Random Copolymer Extrusion Coating/ Lamination and CPP Terpolymer have covered the parameters proposed by the Korean Producers in its product exclusion brief submitted with KADI on 7 February 2024. Apart from those two types, the Korean Producers noted another type of PP Copolymer which cannot be produced by the Petitioner but has not yet included in Rotokemas' proposed exclusion, namely the Transparent Block Copolymers ("Transparent Block"). As already submitted in the product exclusion brief, transparent block copolymer has advantages of both conventional block and random copolymers. where it can provide high transparency along with high impact resistance. As there are no parameters which can be used to measure the level of transparency, the Transparent Block can be identified from its low fish-eye level count, which KADI could refer to and verify as parameter for exclusion.

b. TPC

Having reviewed the parameters proposed by Rotokemas and compared with the product exclusion request submitted by TPC with KADI on 6 February 2024, TPC herewith proposes the following exclusion parameters:

- 1) Random Copolymer Extrusion Coating/ Lamination*
- 2) CPP Terpolymer*

TPC would like to also further emphasize that "visual colour transparency" should not be considered as a criterion for product exclusion, as there is no clear or standardized measurement for transparency for this product in pellet/chip form. Moreover, polypropylene copolymer products in pellet/chip form tend to be more opaque or at least translucent, and fully transparent copolymer chips do not exist.

c. LCTM

*Having reviewed the parameters proposed by Rotokemas and compared with the product exclusion request submitted by LCTM with KADI on 3 August 2024, LCTM herewith proposes the following exclusion parameters:
Random Copolymer Extrusion Coating/ Lamination*

Jawab:

KADI akan mempertimbangkan adanya pengecualian sepanjang pihak yang berkepentingan memberikan bukti yang valid dan didukung adanya spesifikasi yang terukur untuk kemudahan implementasi dilapangan.

Jakarta, 23 Oktober 2024

Komite Anti Dumping Indonesia

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYPROPYLENE COPOLYMER* YANG BERASAL DARI
REPUBLIK KOREA, VIETNAM, PERSATUAN EMIRAT ARAB, MALAYSIA, DAN SINGAPURA**

GLOSARIUM

- 1) BPS : Badan Pusat Statistik
- 2) CIF : *Cost, Insurance and Freight*
- 3) COGS : *Cost of Goods Sold*
- 4) COGSOE : *Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 5) DMCOGSOE : *Domestic Market Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 6) HPP : Harga Pokok Penjualan
- 7) INDCOGSOE : *Indonesian Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 8) IPR : *Inward Processing Regime*
- 9) MFN : *Most Favoured Nation*
- 10) OE : *Operational Expenses*
- 11) PCN : *Product Control Number*
- 12) PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 13) PP : Peraturan Pemerintah
- 14) SGA : *Selling, General and Administrative Expenses*
- 15) VAT : *Value Added Tax*
- 16) XXX : Data bersifat rahasia dan bukan merepresentasikan jumlah digit dalam data tersebut